

AKTUALISASI MODAL SOSIAL DALAM

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

(Studi Kasus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Oleh:

Ashfin Balady

NIM. 12250020

Pembimbing:

M. Izzul Haq, M.Sc

NIP. 198108232009011007

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-468 /Un.02/DD/PP.05.3/03/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**AKTUALISASI MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
(STUDI KASUS PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN
BERBASIS KOMUNITAS DI DESA WONOKERTO, KECAMATAN TURI,
KABUPATEN SLEMAN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ashfin Balady
NIM/Jurusan : 12250020/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 22 Januari 2018
Nilai Munaqasyah : 91 (A -)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,


Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.
NIP 19810823 200901 1 007

Penguji II,


Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001

Penguji III,


Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 22 Januari 2018
Dekan,

Dr. Hj. Nurjannah, M.Si
NIP 19560310 198703 2 001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ashfin Balady

NIM : 12250020

Judul Skripsi : **"Aktualisasi Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Komunitas (Studi Kasus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)"**.

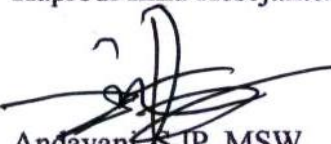
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan.

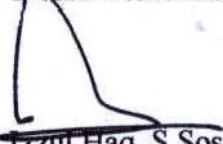
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Mengetahui,
Kaprodik Ilmu Kesejahteraan Sosial


Andayani, S.IP, MSW
NIP. 197210161999032008

Dosen Pembimbing,


M. Izzul Haq, S.Sos, M.Sc
NIP. 198108232009011007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ashfin Balady
NIM : 12250020
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Aktualisasi Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Komunitas (Studi Kasus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Ashfin Balady
NIM 12250020

Halaman Persembahan

Karya ini saya persembahkan untuk pejuang kesejahteraan sosial terutama alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, dalam rangka turut serta melunasi janji kemerdekaan sebagaimana tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada kedua orangtuaku Ibu Suwarsih dan Bapak Sumardi beserta seluruh keluarga besar, Mbak Kitik, Mas Fani, Mas Luqman, Dhila, Mbak Nurul, Dhanes dan Aksa, teman seperjuangan Yusuf, Keluarga Besar mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga beserta civitas akademika, karyawan dan alumni, Masyarakat dan Pemerintah Desa Wonokerto, serta berbagai pihak yang telah membantu dalam selesainya karya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih juga kepada angkringan Bulek Ang yang telah konsisten menyediakan makanan sehat, murah dan bergizi ditengah kegagalan rezim Jokowi-JK dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Motto

Verily with every hardship comes ease.

ABSTRACT

The emergence of writing idea about social capital is a respons toward estrangement of human relationships and the increasing of indifference to our fellow human beings. Whereas in various countrie in the world consider that social capital is one of many determining factor in a development. This research observing about how the social capital is actualized in a government's program named Community-Based Neighborhood Arrangement Program (PLPBK) or Neighbourhood Development (ND) or *Noto Deso* in Wonokerto Village.

This study uses descriptive-qualitative method with case study technique. This method was selected because this study produces descriptive data in writing from observable people and behaviors and having full observation approach on the background of the problem. At the same time, case study technique was selected because this technique is more relevant to track the contemporary event.

The results of this study show that social capital is proven to reduce financing then lead to budget efficiency so that the development can be done maximally. Sosial capital that has been invested can turn into another capital such as financial capital, human capital, and environmental capital. Using social capital in empowerment process can facilitate the transfer of skills and knowledge in the community.

Social capital increases the trust toward the government and among the community itself. It can be strengthen and maintain social existence called *gotong royong*. The mutually agreed rules in PLPBK can support the community's survival and preserve the environment in Sangurejo. The social networks that exist witin the community, can expanding the network to engage external parties to be partner in achieving the common goals. Social capital has changed the face of Sangurejo sub-village that originally a dense, slum, and poor into a beautiful, organized, clean, charming and sub-village, so that formed a Gerbang Sangurejo Tourist Village.

Keywords: Poverty, Empowerment, Social Capital, and Welfare.

INTISARI

Munculnya ide penulisan tentang modal sosial adalah suatu respon peneliti terhadap semakin merenggangnya hubungan antar manusia dan semakin meningkatnya ketidakpedulian terhadap sesama manusia sekarang ini. Padahal di berbagai negara di belahan dunia dewasa ini, modal sosial dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam proses pembangunan. Penelitian ini melihat bagaimana modal sosial diaktualisasikan dalam program pemerintah yang dinamakan sebagai Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) atau Neighborhood Development (ND) atau masyarakat lokal menyebutnya *Noto Deso* di Desa Wonokerto.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati, yakni pendekatan pengamatannya secara utuh pada latar permasalahan. Sedangkan penggunaan pendekatan studi kasus dipilih karena studi kasus lebih relevan untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial telah terbukti menekan pembiayaan, kemudian menyebabkan efisiensi anggaran, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Modal sosial yang diinvestasikan dapat berubah menjadi modal-modal lainnya seperti modal finansial, modal manusia dan modal lingkungan. Menggunakan modal sosial dalam proses pemberdayaan dapat mempermudah transfer kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat.

Modal sosial dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Sehingga memperkuat kerjasama dan mempertahankan eksistensi sosial yakni gotong royong. Aturan-aturan bersama yang disepakati dalam program PLPBK dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan di Sangurejo. Jaringan-jaringan sosial yang terjalin pada masyarakat dapat memperluas jaringan untuk melibatkan pihak eksternal untuk bermitra dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial telah mengubah wajah padukuhan Sangurejo yang semula padat, kumuh, dan miskin menjadi kampung yang cantik, tertata, bersih, dan menawan, sehingga terbentuklah Kampung Wisata Gerbang Sangurejo.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan, Modal Sosial, Kesejahteraan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Aktualisasi Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Komunitas (Studi Kasus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Di Desa Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman)”*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta staff dan civitas akademika
3. Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ibu Andayani S.IP, MSW, yang sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama ini beserta keluarga besar dosen program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial lainnya.
4. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc yang telah bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi dengan membimbing secara ikhlas dan sangat baik sehingga saya dapat menyelesaikan karya sederhana ini.
5. Bapak Kepala Desa Wonokerto, Pak Bambang, Pak Purwanto, Pak Roto, Pak Budiono, Pak Surono, Pak Sehad, Bu Titik, Mbak Erwantini, Mbak Yanti, Mas Andi, Mas Aziz, dan masyarakat Desa Wonokerto, khususnya Padukuhan Sangurejo yang telah membantu memberikan informasi serta pelajaran-pelajaran yang tidak diperoleh di bangku kuliah.

Teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2012 serta teman-teman lainnya, atas dukungan dan kebersamaanya. Teman seperjuangan saya . Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amin.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Yogyakarta, Januari 2018

Ashfin Balady

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Persetujuan Skripsi	iii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iv
Halaman Persembahan	v
Ucapan Terimakasih.....	vi
Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Abstract	ix
Intisari	x
Daftar Isi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LOKASI PENELITIAN DAN DESKRIPSI PROGRAM

A. Deskripsi Wilayah	
1. Administratif	27
2. Kependudukan	28
3. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya	30
4. Penggunaan Lahan	31
5. Kepadatan	33
6. Kemiskinan	35
7. Kekumuhan	35
B. Deskripsi Program	
1. Tujuan	38
2. Lokasi.....	39
3. Alokasi Anggaran	40
4. Target Output	40
5. Pihak Terlibat Langsung	42

BAB III AKTUALISASI MODAL SOSIAL DALAM PLPBK

A. Pelaksanaan Program PLPBK	
1. Tahap Persiapan	45

2. Tahap Perencanaan	46
3. Tahap Pembangunan	56
4. Tahap Keberlanjutan	62
B. Bentuk-Bentuk Modal Sosial Masyarakat	
1. Kepercayaan Masyarakat	64
2. Jaringan Sosial	72
3. Aturan Bersama	76
C. Pemberdayaan Dalam PLPBK	
1. Tahap Penyadaran	84
2. Tahap Transformasi	86
3. Tahap Peningkatan Kemampuan	90
D. Peningkatan Kesejahteraan Setelah PLPBK	
1. Permasalahan Sosial Diatasi	99
2. Kesempatan Sosial Dimaksimalkan	101
3. Kebutuhan Manusia Terpenuhi	101
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
C. Penutup	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan klasik, akan tetapi selalu aktual untuk dibahas. Setelah lebih dari 72 tahun negara ini merdeka, penduduk miskin di Indonesia terus meningkat. Selama periode September 2014-Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015).¹ Tingginya angka kemiskinan merupakan kritik pembangunan Indonesia belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ada kehidupan modern yang berkembang pesat di kota-kota besar seperti Jakarta, hingga ada kehidupan yang tertinggal seperti pada zaman batu di Papua.

Desa-desa di Indonesia sebenarnya tidak miskin. Indonesia memiliki anugerah kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah ruah. Membentang dari Sabang hingga Merauke, menjulang dengan gagah gunung-gunung menjadikan tanah Indonesia subur. Memiliki banyak keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Perairan meliputi laut yang kaya sumberdaya, berbagai variasi spesies ikan dan hasil laut yang melimpah. Danau-danau hingga sungai-sungai yang mengalir tanah hingga pelosok pedesaan. Daratan yang mengandung

¹ <http://bps.go.id/brs/view/1158>/diakses pada 29Maret 2017 pukul 08.06 WIB

banyak kandungan kekayaan mineral mulai dari tembaga, timah, batu bara, emas, minyak bumi, gas alam hingga panas bumi. Negeri ini pernah swasembada beras dan tidak pernah kekurangan garam.

Akan tetapi, banyak masyarakat sekarang ini yang menjerit karena miskin, jalan rusak, harga cabai mahal, gedung sekolah ambruk, banjir merendam pemukiman warga, dan berbagai persoalan lainnya. Masyarakat menghendaki jalan mulus tetapi tidak ada upaya gotong royong memperbaiki jalan sebelum datang bantuan dari pemerintah. Masyarakat protes terendam banjir, tetapi tidak ada kerja bakti memperbaiki saluran air bahkan terbiasa membuang sampah sembarangan di sungai. Masyarakat memprotes gedung sekolah ambruk tanpa ada upaya bersama untuk mengganti genteng yang bocor dan memelihara gedung sekolah dengan baik. Banyak masyarakat kita yang mengeluh miskin dan gizi buruk. Untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan pun masyarakat kita enggan menanam justru terbiasa membeli di pasar, sedangkan banyak tanah pekarangan yang dibiarkan kosong.

Masyarakat kita hanya berkumpul pada acara-acara seremonial, acara adat maupun acara keagamaan seperti kematian, pernikahan, yasinan, kenduri dan sebagainya. Akan tetapi tidak ada inisiatif berkumpul menciptakan kebersamaan untuk menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam urusan meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat kita cenderung individualistis. Ada sesuatu yang hilang pada masyarakat kita saat ini, yang hilang saat ini bukan saja subsidi listrik dan BBM, akan tetapi kita telah kehilangan kekuatan sosial (*social power*). Kekuatan

untuk mengatasi permasalahan secara kolektif. Kekuatan ini terlahir dari modal sosial.

Menurut Soetomo, dalam khazanah kekayaan budaya bangsa yang majemuk ini terdapat modal sosial dan kearifan lokal yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kondisi hidupnya, walaupun berbeda bentuk akan tetapi memiliki tujuan yang sama yakni kesejahteraan.² Melihat indikasi modal sosial pada masyarakat sebagai bagian budaya turun temurun, tentunya dapat dimanfaatkan pemerintah menjadi salah satu faktor pembangunan.

Indonesia merupakan negara yang besar, tentunya persoalannya sangat kompleks dan komperhensif. Dalam mengatasi permasalahan tersebut modal sosial cenderung diabaikan. Modal sosial sama sekali belum menjadi bagian penting. Padahal di berbagai negara di belahan dunia dewasa ini, modal sosial dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam proses pembangunan. Sebagaimana modal finansial (*financial capital*) dan modal manusia (*human capital*), modal sosial dewasa ini juga mendapat perhatian sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara.³ Kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan sosial, dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam membangun dan meningkatkan modal sosial. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang mampu memunculkan modal sosial masyarakat salah satunya adalah Program *Neighborhood Development (ND)* atau Penataan Lingkungan

² Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Prespektif Lokal* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 63

³Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 96

Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Program ini berparadigma *sustainable development*, yang berkolaborasi dengan modal sosial masyarakat.

Dipilihnya Desa Wonokerto dalam penelitian ini karena beberapa pertimbangan. Pertama, Desa Wonokerto telah selesai dalam proses PLPBK dan sudah diresmikan. Kedua, terdapat perbedaan sangat mencolok sebelum dan sesudah adanya program baik secara fisik maupun nonfisik. Ketiga, Desa Wonokerto mewakili daerah pedesaan di Indonesia yang masyarakatnya mendapat penghidupan berasal dari alam. Setidaknya ada dua alasan mengapa pembangunan masyarakat pedesaan relevan untuk terus dibahas sampai sekarang ini. Pertama, meskipun dalam dua dasawarsa terakhir pembangunan kota-kota besar sangat pesat, namun secara umum wilayah negara kita masih didominasi oleh daerah pedesaan. Kedua, meskipun era Orde Baru mencanangkan pembangunan berbasis pedesaan sejak 1970-an ditandai dengan inovasi teknologi modern, namun secara umum kondisi sosial, ekonomi serta berbagai aspek lainnya di desa masih terbelakang dan memprihatinkan.⁴

Penelitian ini penting bagi lulusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang nantinya akan menjadi pelaku perubahan (fasilitator ataupun *community worker*) karena dalam pengembangan masyarakat, pengenalan serta mengadaptasi modal sosial akan mempermudah pelaku perubahan dalam melakukan program pengembangan masyarakat.⁵ Selain itu, penelitian ini juga penting sebagai referensi pemerintah maupun kelompok peduli yang hendak

⁴Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 29.

⁵ Isbandi R. Adi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). hlm. 313.

melakukan pembangunan masyarakat berbasis pedesaan dengan memperhatikan modal sosial sebagai salah satu faktor pembangunan. Apalagi di tahun 2016, tiap desa mendapat anggaran fantastis senilai 1 milyar rupiah per desa.⁶ Melihat anggaran yang begitu besar, kebijakan tersebut harus mampu membawa kesejahteraan pada masyarakat desa. Penelitian ini akan melihat bagaimana modal sosial diaktualisasikan dalam program pemerintah di Desa Wonokerto, apakah memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal atau tidak, tentunya hal ini akan menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktualisasi modal sosial masyarakat dalam pemberdayaan komunitas melalui program PLPBK/ND di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kontribusi program PLPBK/ND terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah

1. Mendeskripsikan aktualisasi modal sosial masyarakat penerima dalam program PLPBK/ND di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

⁶<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8bu-dana-desa-dijamin-rp-1-miliar-per-desa-pada-2016> diakses pada 29 Maret 2017 pukul 11.34 WIB.

2. Mendeskripsikan program PLPBK/ND serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis dan secara praktis, yakni

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial berbasis komunitas melalui teori pemberdayaan masyarakat dan teori modal sosial.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial maupun praktisi pengembangan komunitas/masyarakat pada level pekerjaan sosial mezzo maupun makro guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih yang positif bagi masyarakat setempat, pemerintah daerah maupun berbagai pihak yang hendak berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis komunitas.
- b. Menjadi bahan referensi bagi pelaksana pembangunan desa/kelurahan baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun pihak-pihak yang mengupayakan peningkatan kesejahteraan berbasis masyarakat desa di seluruh Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang modal sosial diantaranya: Pertama, penelitian skripsi oleh Maharani Chandra Rukmi yang berjudul “*Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman*”.⁷ Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang berasal dari budaya sehari-hari masyarakat Sendangtirto memiliki peran dalam kemajuan kelompok UPPKS. Sebab masyarakat yang tergabung dalam kelompok UPPKS didasari oleh solidaritas, kebudayaan, serta kewargaan yang memunculkan nilai, norma, sikap gotong royong.

Kedua, penelitian skripsi oleh Dian Ayu Puspitasari yang berjudul “*Peran Modal Sosial Dalam Produktivitas Gapoktan Di Kabupaten Madiun*”.⁸ Penelitian ini berfokus pada kontribusi modal sosial dalam pencapaian tujuan pada Gapoktan Kenongorejo dan Gapoktan Sambirejo yang berada di Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian serta temuan di lapangan menunjukkan adanya modal sosial dalam Gapoktan yang diwujudkan dalam partisipasi anggota, tanggung jawab anggota, aturan yang diterapkan dalam Gapoktan, pertukaran informasi dan kerjasama dalam Gapoktan. Selanjutnya, modal sosial tersebut berkontribusi dalam produktivitas Gapoktan.

⁷Maharani C. Rukmi, *Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman*, Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Manajemen Publik, Fisipol, UGM, 2015).

⁸Dian A. Puspitasari, *Peran Modal Sosial Dalam Produktivitas Gapoktan Di Kabupaten Madiun*, Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Manajemen Publik, Fisipol, UGM, 2015).

Ketiga, penelitian tesis oleh Irawan Jatmiko yang berjudul “*Modal sosial dan Pengembangan Institusi Lokal : Penelitian kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP di Desa Semin Kecamatan Semin dan Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*”.⁹ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain: keberadaan institusi BKM pada kenyataannya tidak selalu efektif apabila tidak didukung oleh ketersediaan modal sosial, keberhasilan P2KP belum seluruhnya diimbangi pengakaran dan pengokohan kelembagaan dan kinerja BKM Semin lebih memiliki kemampuan dalam mengembangkan kapasitasnya dibanding BKM Kepek. Selain itu, perlu dilakukan reorientasi program P2KP kepada masyarakat bahwa P2KP tidak hanya bertujuan kepada perguliran dana dan revitalisasi organisasi dan manajemen BKM serta diperlukan peran pemerintah lokal yang proporsional agar proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dapat lebih efektif.

Kedua penelitian skripsi di atas sebetulnya memiliki tema yang sama dengan penelitian ini, yakni kolaborasi program pemerintah dengan modal sosial. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan. Letak perbedaannya ialah pembatasan modal sosial tersebut. Modal sosial dalam kedua penelitian skripsi tersebut terbatas pada organisasi saja, yakni modal sosial pada anggota organisasi UPPKS dan anggota Gapoktan. Sedangkan dalam penelitian ini modal sosial berasal dari masyarakat desa tanpa terbatas organisasi dan lebih menyeluruh pada masyarakat.

⁹Irawan Jatmiko, *Modal sosial dan Pengembangan Institusi Lokal : Penelitian Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP di Desa Semin Kecamatan Semin dan Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*, Tesis (Yogyakarta : Jurusan Sosiologi, Fisipol, UGM, 2004).

Pada penelitian tesis di atas menggunakan objek BKM dan P2KP, yang notabene adalah cikal bakal dari PLPBK sekarang. Program P2KP merupakan program generasi awal pasca Orde Baru yang menganut paradigma pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1999. Program P2KP berorientasi tujuan pada masyarakat berdaya. Pada era pemerintahan presiden SBY, program P2KP kemudian menjadi bagian dari program PNPM yang berorientasi pada masyarakat mandiri. Kini, program tersebut bertransformasi menjadi PLPBK yang berorientasi pada masyarakat madani. Melihat keberlanjutan program tersebut, evaluasi program sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Apalagi program tersebut masih menggunakan modal sosial dalam proses pelaksanaan. Untuk itu, penelitian ini sangat penting dilakukan guna evaluasi penyempurnaan program pembangunan untuk keberlanjutan pada masa yang akan datang.

F. Kerangka Teori

1. Modal Sosial

Menurut Fukuyama, modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya.¹⁰ Robert D. Putnam dalam John Field, mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkordinasi.¹¹

¹⁰ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, terj. Ruslani (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 37.

¹¹ John Field, *Modal Sosial*, terj. Nurhadi, cet 4 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016), hlm.6.

Modal sosial bersifat sama seperti modal lainnya, modal sosial sosial bersifat produktif, yang memungkinkan pencapaian tujuan yang tidak dapat tercapai tanpa ada keberadaannya.¹² Namun, modal sosial juga memiliki perbedaan dan keunikan dari modal-modal lainnya, antara lain: (1) tidak habis karena digunakan, sebaliknya akan habis jika tidak digunakan. (2) tidak mudah diamati dan diukur dan (3) sulit dibangun dengan intervensi dari luar.¹³ Proses pembangunan yang partisipatif dari bawah ke atas (*bottom-up*) sangat berhubungan erat dengan adanya modal sosial. Menurut Putnam dengan adanya modal sosial, keputusan, dan tindakan bersama para *stakeholders* pembangunan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama.¹⁴ Terdapat tiga parameter dalam modal sosial yakni:

a. Kepercayaan

Menurut Fukuyama, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas atau masyarakat tersebut.¹⁵ Fukuyama meyakini, bahwa kepercayaan sangat bermanfaat bagi penciptaan tatatan ekonomi unggul, oleh karena trust dapat diandalkan untuk mengurangi biaya (*cost*) dan waktu (*time*). Oleh karena itu menurut Putman , kepercayaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemakmuran sosial dan

¹²James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, terj. Imam Mutaqien dkk, cet. 4 (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 420.

¹³Ernan Rustiadi dkk, *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 451.

¹⁴ Ibid, hlm. 461

¹⁵Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial* hlm. 36.

kemajuan ekonomi yang dicapai oleh suatu komunitas maupun bangsa. Rasa saling percaya dan mempercayai menentukan kemampuan suatu bangsa untuk membangun masyarakat dan institusi-institusi di dalamnya guna mencapai kemajuan. Rasa saling mempercayai ini juga akan mempengaruhi semangat dan kemampuan berkompetisi secara sehat di tengah masyarakat. Rasa saling percaya ini tumbuh dan berakar dari nilai-nilai yang melekat pada budaya kelompok.

b. Norma

Menurut Fukuyama, akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya, sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan seperti kesetiaan, kejujuran dan *dependability* (dapat dipercayai, dapat dipertanggungjawabkan/diandalkan). Kelompok lebih-lebih harus mengadopsi norma-norma bersama sebagai satu keseluruhan sebelum kepercayaan bisa digeneralisasikan diantara anggota-anggotanya. Dengan kata lain, modal sosial mustahil diperoleh dari individu-individu yang biasa bertindak diatas kepentingannya sendiri. Alih-alih kebajikan-kebajikan modal sosial lebih didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial secara umum.¹⁶ Norma terdiri dari pemahaman, nilai, harapan, dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok masyarakat. Norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar profesional. Coleman menjelaskan bahwa norma adalah suatu bentuk hak sosial mengontrol tindakan/perilaku seseorang oleh orang lain.

¹⁶ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial*, hlm 38

Hak mengontrol ini disertai dengan bentuk sanksi-sanksi yang dapat membentuk perilaku yang patut.¹⁷

Norma-norma ini terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan tersebut biasanya tidak tertulis, akan tetapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Aturan-aturan kolektif itu misalnya menghormati pendapat orang lain, tidak mencurangi orang lain, kebersamaan dan lainnya.

Apabila di dalam suatu komunitas masyarakat, asosiasi, group, atau kelompok, norma-norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat, maka akan memperkuat masyarakat itu sendiri. Inilah alasan mengapa norma-norma merupakan salah satu unsur modal sosial yang akan merangsang keberlangsungan kohesifitas sosial yang hidup dan kuat.

c. Jaringan

Menurut Fukuyama ialah kemampuan masyarakat dalam berasosiasi karena terikat oleh komunitas moral yang eksis sebelumnya, maka mereka mampu bekerjasama secara efektif.¹⁸ Kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk ikut berpartisipasi guna membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesaamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya

¹⁷ James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, hlm. 334.

¹⁸ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial*, hlm. 19.

komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh kepercayaan dan norma.

2. Pemberdayaan

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata *daya* atau dalam bahasa Inggris disebut *power*. Daya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu.¹⁹ Pemberdayaan berarti proses menuju berdaya atau proses memperoleh daya/kekuatan/kemampuan. Pemberdayaan diadopsi dari istilah Barat yakni *empowerment* yang artinya pemberkuasaan. Menurut Jim Ife,

“empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skill to increase their capacity to determine their own future and participate in and affect the life of their community.”

(Pemberdayaan artinya memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.²⁰ Pada intinya pemberdayaan adalah upaya membangun kapasitas (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan sumberdaya manusia yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana yakni dilakukan melalui edukasi masyarakat dengan beberapa tahap yaitu

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm. 299.

²⁰ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*, terj. Sastrawan Manulang dkk (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm 182.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga mampu dalam berinisiatif dan kemampuan berinovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.²¹

Apabila kelompok komunitas sudah memiliki kepercayaan (*trust*), memiliki jaringan (*networking*) dan patuh norma (*norm*)) maka akan tercipta modal sosial yang kuat. Dengan modal sosial yang kuat maka kita akan dengan mudah mentransfer pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada masyarakat dan mengarahkannya. Jadi, keberadaan modal sosial sangat mempengaruhi keberhasilan proses pelaksanaan pemberdayaan.

Pemberdayaan bukanlah proses yang abadi. Disuatu titik jika masyarakat telah mencapai kemandirian dan keberdayaan, proses pelaksanaan pemberdayaan harus dihentikan. Berikut adalah cara melihat perkembangan masyarakat yang telah mencapai tingkat keberdayaan

Tabel 1.1 Indikator Pencapaian Keberdayaan Masyarakat

Tahapan Afektif	Tahapan Kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
Belum merasa sadar & peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran & kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai keterampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan

²¹ Ambar T. Sulistayani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), hlm. 99.

Memupuk rasa kesadaran & kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan.

(Sumber : Sulistiyani, 2004)

Setelah masyarakat dinilai telah mencapai di tingkat keberdayaan dan kemandirian, selanjutnya bersama-sama pemangku kepentingan, stakeholder dan pemegang kekuasaan harus melakukan perlindungan terhadap objek pemberdayaan tersebut agar masyarakat mampu tumbuh berkembang tanpa gangguan atau ancaman terhadap kondisi berdaya tersebut.

Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan, dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan baik lingkungan fisik maupun sosial.²² Menurut James Midgley dalam Isbandi (2013) kesejahteraan sosial sebagai kondisi dalam suatu masyarakat, kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat

²²Ibid, hlm. 19.

dimaksimalisasikan.²³ Dengan demikian, proses pemberdayaan selesai setelah masyarakat dalam kondisi berdaya dan sejahtera.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati, yakni pendekatan pengamatannya secara utuh pada latar permasalahan dan individu.²⁴ Sedangkan penggunaan pendekatan studi kasus dipilih karena studi kasus lebih relevan untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer. Selain itu, studi kasus juga memiliki kelebihan, yakni kemampuan untuk berhubungan dengan jenis bukti dokumen, peralatan, wawancara dan observasi.²⁵

1. Lokasi Penelitian dan Objek

Penelitian ini berlokasi di Padukuhan Sangurejo, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Alasannya, pertama Padukuhan tersebut telah melaksanakan program PLPBK. Kedua, kawasan tersebut menjadi kawasan prioritas berdasarkan kriteria persyaratan program PLPBK yakni *Pakumis* atau padat, kumuh, miskin. Penetapan kawasan prioritas ini berdasarkan Pemetaan Swadaya Tim Inti Perencanaan Partisipatif Desa Wonokerto.

²³ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 23.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 35 (Bandung: PT. Remaja Rosdaya, 2016), hlm. 4.

²⁵ Robert K.Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.12.

2. Penentuan Subjek

Dalam penelitian kualitatif, menentukan subjek dilakukan dengan sengaja (*purposive*) agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Perwakilan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- b. Perwakilan Pemerintah Desa (Kaur Pembangunan Desa Wonokerto)
- c. Perwakilan Fasilitator Kelompok (Faskel/Pendamping)
- d. Dukuh Sangurejo.
- e. Tim Inti Perencana Partisipatif dan Pemasaran (TIPP)
- f. Perwakilan Masyarakat yang berkontribusi dalam PLPBK atau (Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM).

3. Fokus Penelitian

Diperlukan pembatasan agar penelitian ini fokus dan tidak meluas yakni tentang bentuk-bentuk modal sosial masyarakat Desa Wonokerto terhadap program PLPBK. Dasar pertimbangannya ialah:

- a. Keterbatasan dana, waktu, dan masa studi yang dimiliki peneliti.
- b. Kajian pembahasan dalam modal sosial sangat luas dan mendalam, karena itu peneliti membatasi fokus penelitian pada bentuk modal sosial yang diterapkan masyarakat terhadap program PPLBK guna meningkatkan kesejahteraan.

4. Jenis Data

Berikut jenis data yang diperoleh peneliti yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari temuan di lapangan.

Data ini diperoleh dari observasi (pengamatan), wawancara (menggunakan *indepth interview*) dari informan di program PLPBK yang paham dan mendukung penelitian ini. Peneliti mendapatkan data primer berupa hasil wawancara dengan Kordinator LKM Wonomulyo, Kepala Urusan Pembangunan, perwakilan Fasilitator Kelompok/Pendamping, Dukuh Sangurejo dan perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sedangkan observasi yang dilakukan, peneliti mendapat berbagai data berupa kondisi sosial, ekonomi, budaya lingkungan yang ada di objek penelitian setelah pelaksanaan program PLPBK.

- b. Data Sekunder adalah data yang berasal dari pemanfaatan berbagai sumber pustaka yang ada dan dari sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang diperoleh peneliti antara lain Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan PLPBK 2014, Dokumen Pemasaran Sosial, Laporan Akhir PLPBK LKM Wonomulyo 2015, Dokumen Strategi Pemasaran, RPLP Desa Wonokerto, RTPLP Desa Wonokerto, Dokumen Pemetaan Swadaya Desa Wonokerto, Dokumentasi Program PLPBK.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni mengambil kasus dengan berbagai metode yang sesuai dengan kriteria dan tujuan tertentu.²⁶ Teknik-teknik penelitian tersebut antara lain:

²⁶Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, terj. Edina T. Sofia (Jakarta : Indeks, 2013), hlm. 297.

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian adalah observasi nonpartisipan hal itu karena program PLPBK telah selesai beberapa tahun yang lalu dan kini hanya dapat dilakukan observasi ialah berbagai kegiatan setelah program ini selesai. Observasi yang diperoleh antara lain Dengan demikian observer/peneliti akan lebih leluasa mengamati kemunculan tingkah laku yang terjadi.
- b. *In depth interview* yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam kepada narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan Kordinator LKM Wonomulyo 1 Orang, Kepala Urusan Pembangunan Desa Wonokerto 1 Orang, perwakilan Fasilitator Kelompok/Pendamping 1 Orang, Dukuh Sangurejo 1 Orang dan perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 3 Orang. Wawancara dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Peneliti melakukan wawancara dengan subjek-subjek dengan menentukan pertanyaan sesuai bidang masing-masing.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan data primer dari responden dan narasumber, serta data sekunder dari instansi terkait yang mendukung penelitian baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dokumentasi yang dapat dilakukan peneliti ialah berkaitan dengan observasi, yakni temuan-temuan yang mendukung penelitian meskipun didokumentasikan setelah program PLPBK ini selesai.

6. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data atau teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan agar data penelitian bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu dengan cara:

- a. Ketekunan Pengamatan, yaitu bertujuan untuk fokus serta *istiqomah* terhadap kasus yang diteliti.
- b. Triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lainnya. Triangulasi terdapat dua pendekatan yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik.²⁷ Triangulasi dengan sumber berarti mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi dari waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dilakukan dengan (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah. (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sedangkan triangulasi dengan teknik, yaitu membandingkan dan mengecek hasil observasi, wawancara secara terstruktur maupun yang tidak terstruktur.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

7. Analisis Data

Setelah seluruh rangkaian dan tahapan penelitian, analisis data memainkan peran utama. Apakah arti pengumpulan data jika tidak dianalisis. Menganalisis data maksudnya ialah peneliti secara sistematis melakukan proses menyusun, mengintegrasikan dan menyelidiki; sewaktu melakukannya, kita mencari pola dan hubungan diantara rincian spesifik.

Memang dalam pendekatan kualitatif, analisis telah dilakukan ketika mengumpulkan data, akan tetapi hal tersebut bersifat tentatif dan tidak menyeluruh. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dapat dilakukan dengan tiga cara yakni,²⁸

a. Reduksi

Yaitu banyaknya hasil data yang diperoleh dari penelitian akan diringkas dan selanjutnya disusun secara sistematis agar lebih fokus dan relevan dengan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Yaitu menyajikan data hasil temuan penelitian yang relevan dengan tema maupun masalah penelitian sehingga bisa tahu apa yang disajikan.

c. Penarikan Kesimpulan

Yaitu berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, peneliti kemudian menarik kesimpulan atas fakta empiris yang telah ada.

Penelitian mengenai aktualisasi modal sosial dalam pemberdayaan komunitas dengan studi kasus program PLPBK di Desa Wonokerto, Kecamatan

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 209.

Turi, Kabupaten Sleman ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, membaca keseluruhan data (transkrip, gambar, data lapangan, materi). Kemudian mengelompokkan dengan format yang berbeda. Kedua, melakukan analisis lebih detail untuk dilakukan koding data. Ketiga, menerapkan koding data dengan mendeskripsikan peran-peran, setting, kategori dan tema yang akan dianalisis. Keempat, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam bentuk narasi deskriptif. Kelimaa, mengintrepretasi data dengan memberikan penarikan kesimpulan apa yang telah menjadi esensi dan substansi dalam suatu kejadian penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menguraikan beberapa hal yang ditulis dalam skripsi ini yakni: Bab pertama berisi tentang berbagai persoalan yang menjadi latar belakang penelitian, yakni kemiskinan di Indonesia terus meningkat, akan tetapi masyarakat Indonesia hanya berkumpul pada acara-acara seremonial saja. Tidak aka inisiatif untuk berkumpul, bersatu dalam mengatasi masalah bersama salah satunya ialah kemiskinan. Padahal dibelahan dunia saat ini, masyarakat modern cenderung memperhatikan kekuatan sosial yang terlahir dari modal sosial dalam mengatasi masalah yang kompleks dan komperhensif. Kemudian dapat dilakukan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, hingga metode penelitian.

Bab kedua berisi tentang deskripsi tentang kondisi sebagian wilayah Desa Wonokerto serta kondisi kawasan prioritas yang melaksanakan program PLPBK.

Selain itu juga dibahas secara singkat profil mengenai program PLPBK/ND dan unsur-unsur yang terlibat dalam program .

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan program PLPBK di Padukuhan Sangurejo, bentuk modal sosial masyarakat terhadap program PLPBK, pemberdayaan dalam program PLPBK serta kontribusi dari Program PLPBK terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Bab keempat berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran yang ditujukan berbagai pihak dan penutup.

BAB II

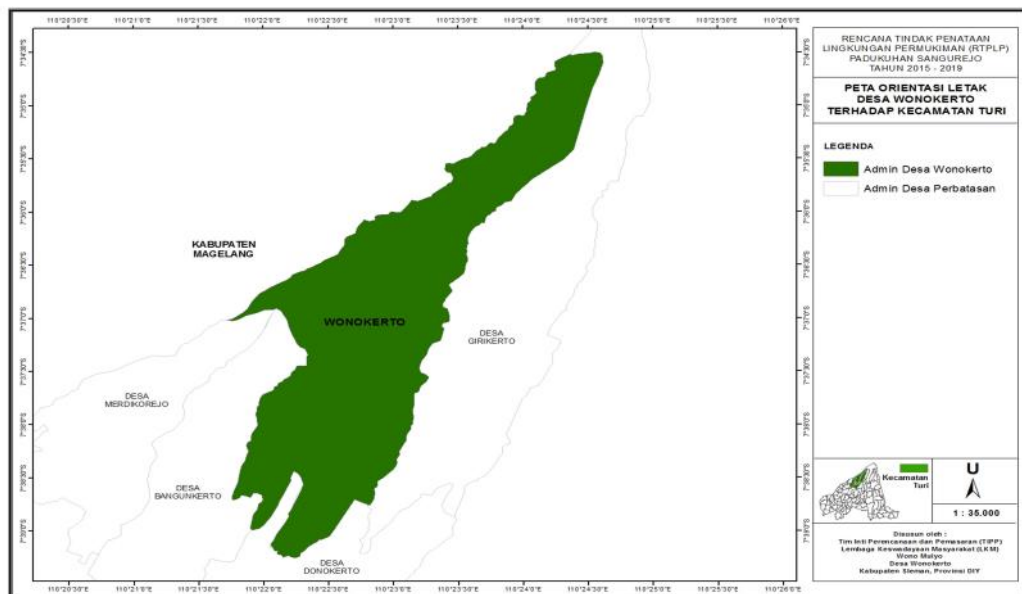
LOKASI PENELITIAN DAN DESKRIPSI PROGRAM

A. Deskripsi Wilayah

Secara administratif Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Desa Wonokerto memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Desa Girikerto Kecamatan Turi. |
| Sebelah Timur | : Desa Girikerto Kecamatan Turi. |
| Sebelah Selatan | : Desa Merdikorejo, Desa Bangunkerto, dan Desa Donokerto, Kecamatan Turi. |
| Sebelah Barat | : Desa Srumbung, Kab. Magelang, Jawa Tengah. |

Gambar 2.1 Peta Desa Wonokerto



(Sumber : Dokumen RTPLP PLPBK Padukuhan Sangurejo 2014)

Luas wilayah Desa Wonokerto ialah 1.002,9 Ha,¹ yang terdiri dari wilayah untuk sawah/pertanian, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Desa Wonokerto terdiri dari 13 padukuhan yang terdiri dari 63 RT dan 39 RW dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Desa Wonokerto

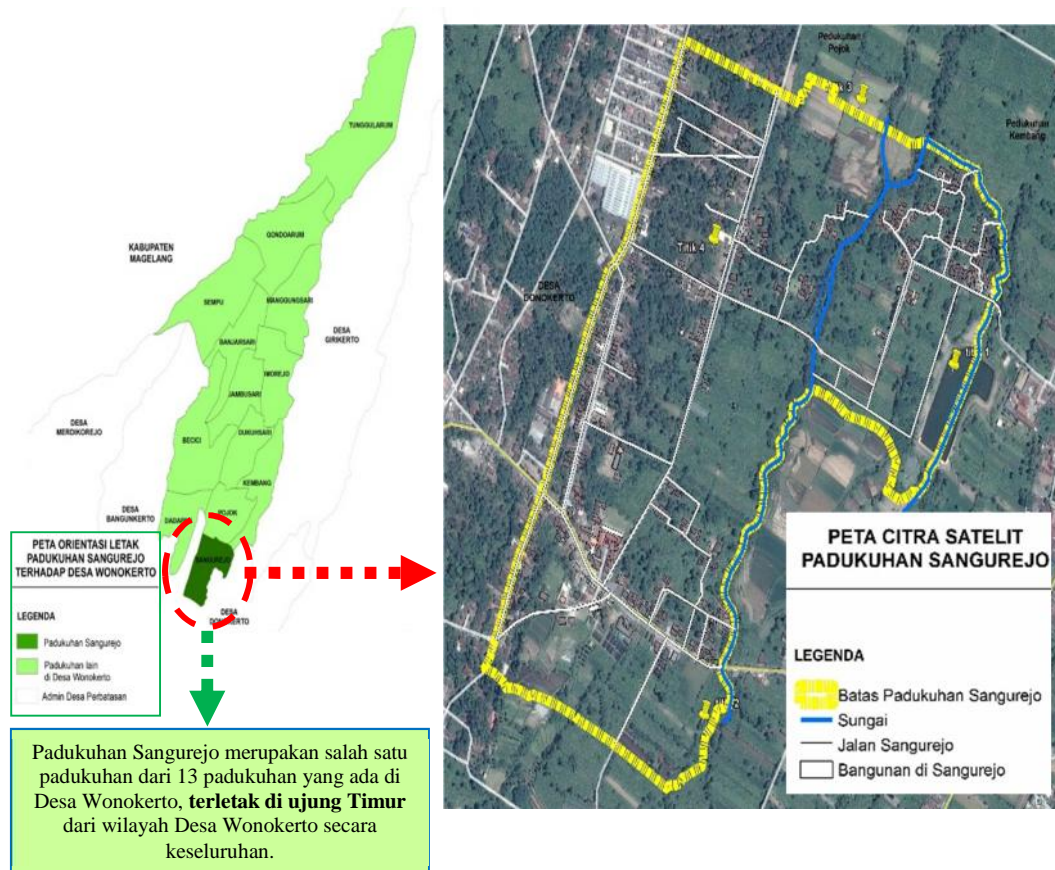
No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Tunggularum	2	4
2	Gondoarum	2	4
3	Sempu	2	5
4	Banjarsari	3	6
5	Manggungsari	2	5
6	Imorejo	2	4
7	Jambusari	3	6
8	Dukuhsari	2	4
9	Kembang	2	5
10	Pojok	2	4
11	Sangurejo	2	5
12	Becici	3	6
13	Dadapan	2	5
Total		39	63

(Sumber : Pemetaan Swadaya TIP Desa , 2011)

¹ Dokumen Laporan Akhir PLPBK LKM Wonomulyo Tahun 2015, hlm. 69

Padukuhan Sangurejo adalah kawasan prioritas terpilih di Desa Wonokerto. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, Padukuhan Sangurejo merupakan Padukuhan yang paling memenuhi kriteria sebagai kawasan prioritas, yaitu *Pakumis* atau Permukiman Padat, Kumuh dan Miskin. Padukuhan Sangurejo terpilih sebagai kawasan prioritas di Desa Wonokerto setelah melalui serangkaian proses penetapan kawasan prioritas yang menggunakan metode *scoring* dan survey.

Gambar 2.2 Peta Padukuhan Sangurejo



(Sumber : Dokumen RTPLP PLPBK Padukuhan Sangurejo 2014)

1. Administratif

Padukuhan Sangurejo yang mempunyai luas wilayah 38,41 Ha² adalah salah satu Padukuhan di Desa Wonokerto yang berada di sebelah Selatan dari wilayah Desa Wonokerto, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

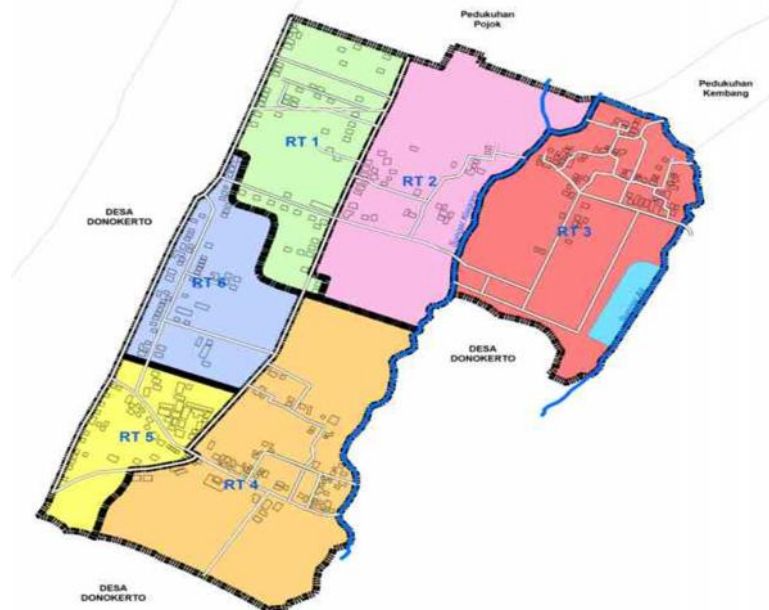
Utara : Padukuhan Pojok dan Padukuhan Kembang.

Selatan: Desa Donokerto, Kecamatan Turi.

Barat : Desa Donokerto, Kecamatan Turi.

Timur : Desa Donokerto, Kecamatan Turi.

Gambar 2.3 Peta Pembagian Wilayah Padukuhan Sangurejo



(Sumber : Dokumen RTPLP PLPBK Padukuhan Sangurejo 2014)

Kring merupakan sebutan lokal wilayah dibawah tingkat Padukuhan. *Kring* Kenteng meliputi RT 1, RT 2, keduanya termasuk dalam RW 28. Kemudian *Kring* Sangurejo meliputi RT 3 saja, juga termasuk kedalam RW 28.

² Dokumen RTPLP Sangurejo 2015-2019. hlm . 1

Kring Keringan meliputi RT 4, RW 29 saja. Terakhir, RT 5, RT 6 bagian dari *Kring* Lungguhrejo yang tergabung dalam RW 29.

Tabel 2.2 Pembagian RT/RW Padukuhan Sangurejo

RT	RW	Kring
1	28	Kenteng
2		
3		Sangurejo
4	29	Keringan
5		Lungguhrejo
6		

(Sumber : Dokumen Strategi Pemasaran PLPBK Padukuhan Sangurejo 2014)

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Padukuhan Sangurejo adalah 960 jiwa, dengan komposisi laki – laki sebanyak 466 jiwa (48,54 %) dan perempuan sebanyak 494 jiwa (51,46 %). Jumlah penduduk dan jumlah KK yang paling banyak berada di RT 3 yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 253 jiwa (26,35% dari seluruh jumlah penduduk di Padukuhan Sangurejo) dan jumlah KK sebanyak 67 KK (23,10% dari seluruh jumlah KK di Padukuhan Sangurejo). Sedangkan jumlah penduduk dan jumlah KK yang paling sedikit berada di RT 2 yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 87 jiwa (9,06% dari seluruh jumlah penduduk di Padukuhan Sangurejo) dan jumlah KK sebanyak 29 KK (10,00 % dari seluruh jumlah KK di Padukuhan Sangurejo).³

³ Dokumen Pemasaran Padukuhan Sangurejo, hlm. 4

Tabel 2.3 Kependudukan Masyarakat Sangurejo

Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk di Masing-Masing RT						Jumlah
	RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 6	
Jumlah Penduduk	178	87	253	151	123	168	960
Jumlah Kepala Keluarga	56	29	67	47	39	52	290
Penduduk Menurut Jenis Kelamin							
a. Laki - Laki	88	35	122	83	54	84	466
b. Perempuan	90	52	131	68	69	84	494
Jumlah	178	87	253	151	123	168	
Penduduk Menurut Usia Produktif							
a. Usia 0 - 14 Tahun	38	17	64	31	29	40	219
b. Usia 15 - 64 Tahun	128	62	180	103	87	120	680
c. Usia di atas 65 Tahun	12	8	9	17	7	8	61
Jumlah	178	87	253	151	123	168	
Penduduk Menurut Pendidikan							
a. D3/ S1 ke atas	10	3	24	35	17	11	100
b. SMA/ SMK	50	23	145	49	45	54	366
c. SMP	8	13	22	26	25	29	123
d. SD	83	39	31	18	21	21	213
e. Tidak Sekolah	20	0	0	14	4	5	43
f. Belum Sekolah	7	9	31	9	11	48	115
Jumlah	178	87	253	151	123	168	
Pekerjaan Kepala Keluarga							
a. Petani	21	4	32	21	8	8	94
b. Buruh Tani	9	0	0	0	2	2	13
c. Buruh Bangunan	6	4	5	1	4	13	33
d. PNS	7	0	2	4	3	4	20
e. Pegawai Swasta	5	4	12	10	6	4	41
f. Pedagang	5	1	6	5	6	6	29
g. Jasa	0	1	4	1	3	3	12
h. Industri	0	1	0	0	0	0	1
i. Wiraswasta	0	0	0	0	1	0	1
j. Pensiunan	0	1	3	5	3	0	12
k. TNI/ Polri	0	0	0	0	0	1	1
l. Lain - Lain	3	0	3	0	0	0	6
m. Tidak Bekerja Tetap	0	13	0	0	3	11	27
Jumlah	56	29	67	47	39	52	

(Sumber : Dokumen Strategi Pemasaran PLPBK Padukuhan Sangurejo 2014)

Sebagian besar penduduk Padukuhan Sangurejo berusia produktif (14 – 64 tahun) yaitu sebanyak 680 jiwa (70,83%). Kondisi ini merupakan potensi yang dimiliki Padukuhan Sangurejo, karena dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berusia produktif, maka memberikan peluang yang besar bagi kemajuan wilayah.

3. Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ada, penduduk Padukuhan Sangurejo paling banyak menyelesaikan pendidikan SMA/ SMK yaitu sebanyak 366 jiwa, selanjutnya SD sebanyak 213 jiwa, dan SMP sebanyak 123 jiwa. Dilihat dari kondisi ini, maka untuk aspek pendidikan, masyarakat Padukuhan Sangurejo sudah mempunyai pendidikan yang baik sebagai modal dalam melakukan perubahan.

4. Pekerjaan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Padukuhan Sangurejo banyak yang bekerja sebagai Petani, yaitu Petani Salak sebanyak 94 jiwa (32,41 %). Hal ini sesuai dengan banyaknya Kebun Salak di Padukuhan Sangurejo yaitu seluas 101.900 m². Mayoritas masyarakat Sangurejo menanam dan berusaha yang berhubungan dengan salak, baik itu pengepul atau pedagang, penyedia angkutan ataupun jasa lainnya, seperti membersihkan kebun salak.

5. Kondisi Sosial

Sebagaimana kondisi sosial pada masyarakat pedesaan pada umumnya, kondisi sosial masyarakat Desa Wonokerto yang penuh kebersamaan, kegotongroyongan hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Nilai-nilai kekeluargaan

masih dijunjung tinggi, sehingga setiap ada persoalan yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melalui musyawarah mufakat. Disamping itu, hubungan kekerabatan dan keterikatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling bantu-membantu baik dalam hal kesusahan maupun ketika masyarakat punya hajatan seperti kenduri/kondangan.⁴

6. Kondisi Budaya

Budaya yang berkembang di Desa Wonokerto adalah budaya masyarakat agraris, salah satunya adalah sifat gotong royong dan kekeluargaan masyarakatnya masih tinggi. Seperti pembagian air irigasi pertanian dan *sambatan* dalam mendirikan rumah atau bangunan lainnya. Di Sangurejo juga terdapat berbagai kesenian. Seperti *Jathilan*, Kubro Siswo, Pencak Silat Mataraman hingga yang bernuansa Islami seperti *Hadroh*. Semua berkembang dengan baik dan selaras dikarenakan masyarakat Desa Wonokerto selain religius juga menjunjung budaya kearifan lokal yang tinggi terhadap anggota masyarakat sekitar.

Hal ini dibuktikan dengan masih dijalankannya berbagai adat istiadat seperti upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *life circle*, diantaranya :

1. Upacara *Mitoni* yaitu selamat pada saat usia kehamilan mencapai genap 7 bulan.
2. *Jagongan* yaitu acara *wungon* (tidak tidur semalam suntuk) atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam (satu minggu).

⁴ Wawancara dengan Pak Sehadi, Dukuh Sangurejo pada tanggal 23 Mei 2017

3. *Selapanan* yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 hari sebagai ucapan rasa syukur.
4. Upacara kematian, dari *surtanah*, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
5. Upacara pernikahan dengan berbagai urutan pernik pernik tradisi jawa seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi.⁵

7. Penggunaan Lahan

Wilayah Desa Wonokerto dikenal sebagai penghasil Salak di Kabupaten Sleman. Semua padukuhan yang ada di Desa Wonokerto mempunyai Kebun Salak, termasuk di Padukuhan Sangurejo. Luas Kebun Salak di Padukuhan Sangurejo adalah sebesar 101.900 Ha (26,53 %) dan merupakan penggunaan lahan terbesar kedua di Padukuhan Sangurejo setelah Kebun Campuran.

Saat ini, Perkebunan Salak merupakan sumber ekonomi utama bagi masyarakat Desa Wonokerto, termasuk masyarakat Padukuhan Sangurejo. Hal ini juga didukung oleh banyaknya masyarakat Padukuhan Sangurejo yang bekerja sebagai Petani Salak yaitu sebesar 32,41% (94 KK). Penggunaan lahan terbesar di Padukuhan Sangurejo adalah untuk Kebun Campuran (104.350 m² atau 27,16%), kemudian kedua untuk Kebun Salak (101.900 m² atau 26,53%), dan yang ketiga untuk Permukiman (85.000 m² atau 22,13 %). Sedangkan untuk Sawah hanya seluas 34.800 m² atau 9,06 %.⁶

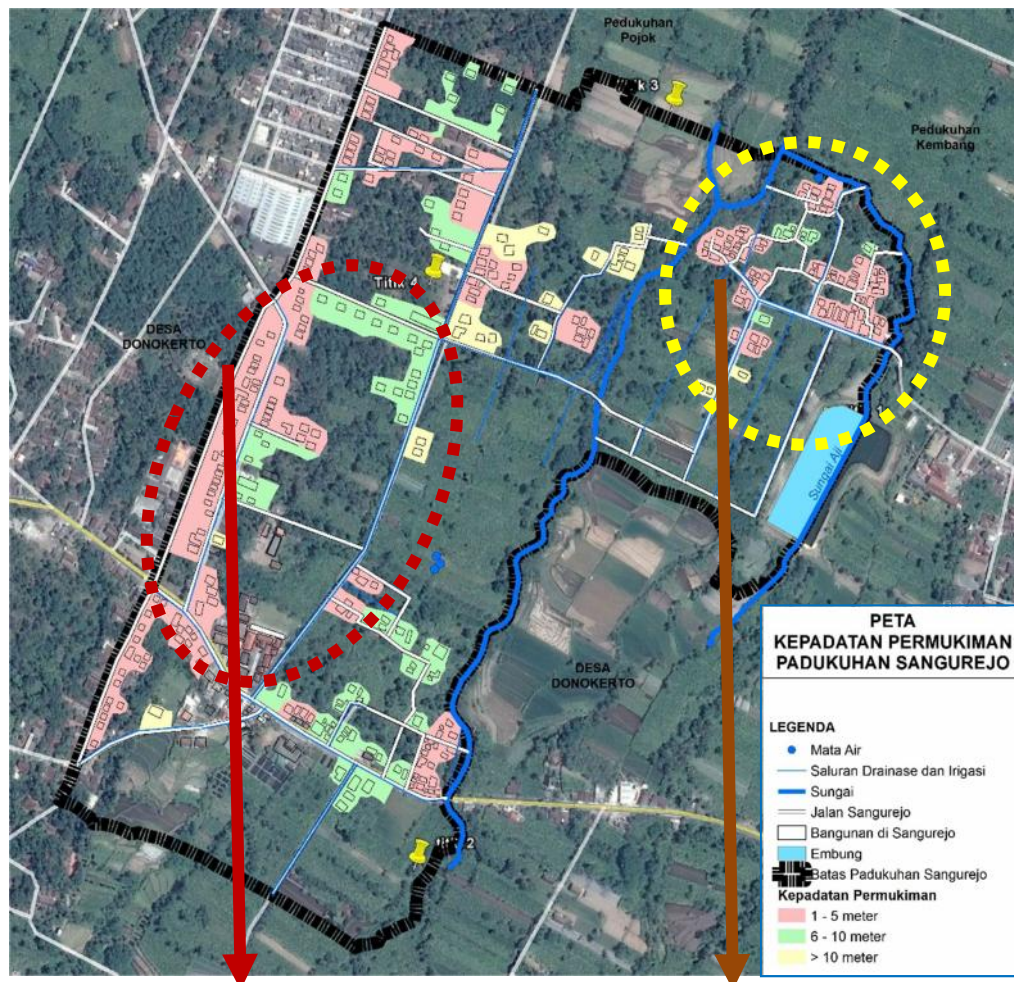
⁵ Wawancara dengan Pak Sehadi, Dukuh Sangurejo pada tanggal 23 Mei 2017

⁶ Dokumen Pemasaran Padukuhan Sangurejo, hlm. 11

8. Kepadatan

Kondisi permukiman dan tingkat kemiskinan masyarakat merupakan indikator utama dalam penentuan Padukuhan Sangurejo sebagai kawasan prioritas di Desa Wonokerto.

Gambar 2.4 Kepadatan Wilayah Padukuhan Sangurejo



Sebagian besar bangunan di RT 6 mempunyai jarak antar rumah antara 1 – 5 meter (seperti RT 3), namun di RT 6 ini pekarangan tiap rumah relatif lebih luas, sehingga permukiman tidak sepadat RT 3

Dari jarak antar rumah, terlihat bahwa permukiman yang paling padat adalah di RT 3

(Sumber : Dokumen RTPLP PLPBK Padukuhan Sangurejo 2014)

Pemukiman di Padukuhan Sangurejo merupakan pemukiman yang padat dan kumuh. Kepadatan permukiman ini dapat dilihat dari jarak antar rumah yang sempit yaitu sebagian besar berjarak kurang dari 5 meter. Orientasi bangunan juga tidak serasi satu sama lain, sehingga tata letak bangunan tidak tertata dengan baik. Kondisi ini tentu menjadikan permukiman di Padukuhan Sangurejo padat dan tampak tidak beraturan, serta tidak didukung oleh Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat yang cukup dan jaringan jalan yang memadai akibat keterbatasan lahan dan ketidakteraturan letak bangunan.⁷

9. Kekumuhan

Berkaitan dengan kekumuhan lingkungan permukiman, Padukuhan Sangurejo termasuk lingkungan permukiman yang belum bersih/belum sehat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebanyak 48 rumah di Padukuhan Sangurejo tidak melengkapi WC nya dengan septic tank sehingga saluran dari WC dibuang ke sungai dan ke saluran air yang membentang di permukiman; masih terdapat 23 rumah yang tidak mempunyai WC; terdapat 30 kandang yang menyatu/berdekatan dengan rumah; serta banyak sumber air bersih yang letaknya berdekatan dengan *septic tank* maupun kandang (berjarak kurang dari 10 meter).⁸

Selain itu, limbah rumah tangga secara umum masih dibuang ke belakang pekarangan rumah tanpa dilengkapi dengan saluran buangan. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar rumah menjadi becek, kotor, dan tentu dapat menjadi sumber berkembangnya bibit penyakit. Pengelolaan sampah pun belum

⁷ Ibid, hlm.11

⁸ Ibid, hlm.21.

dilakukan dengan baik, sehingga masih banyak ditemukan timbunan sampah di permukiman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan permukiman di Padukuhan Sangurejo belum bersih/ sehat.

Gambar 2.5 Kekumuhan Sebagian Masyarakat Sangurejo



(Sumber : Dokumen Pemetaan Swadaya Padukuhan Sangurejo 2014)

10. Kemiskinan

Kemudian terkait dengan kemiskinan, jumlah warga miskin di Padukuhan Sangurejo menempati urutan terbesar kedua di Desa Wonokerto, yaitu sebesar 42,35 %. Sedangkan untuk prosentase KK Miskin Padukuhan Sangurejo adalah 27,93 % terhadap seluruh jumlah penduduk di Padukuhan Sangurejo, atau sebanyak 81 KK Miskin.⁹

Tabel 2.4 Data Masyarakat Miskin di Sangurejo

KK Miskin	RT						Jumlah KK Miskin
	1	2	3	4	5	6	
TPK	9	10	19	3	15	15	71
Tambahan	2	0	4	1	1	2	10
	11	10	23	4	16	17	81
% KK Miskin terhadap Jumlah Seluruh KK	19,64	34,48	34,33	8,51	41,03	32,69	27,93

(Sumber : Dokumen Strategi Pemasaran PLPBK Padukuhan Sangurejo 2014)

⁹ Ibid, hlm. 13.

Beberapa hal di atas menjadi pertimbangan dalam penetapan Padukuhan Sangurejo sebagai kawasan prioritas di Desa Wonokerto karena memenuhi kriteria *Pakumis* (Padat, kumuh, miskin), tentu dengan tetap menggunakan metode kuantitatif yang baik yaitu metode scoring.

B. Deskripsi Program PLPBK

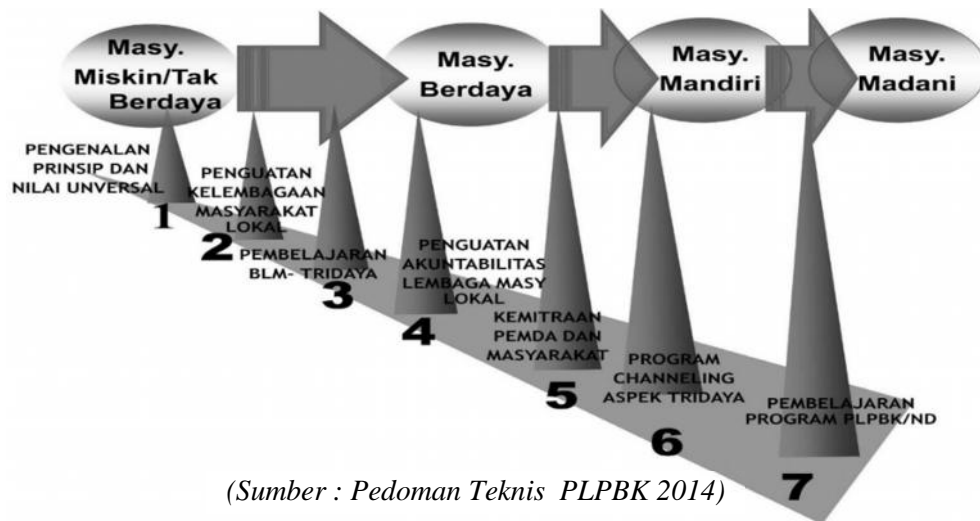
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas disebut juga *Neighborhood Development (ND)* atau masyarakat lokal sering menyebutnya sebagai *Noto Deso* adalah kelanjutan dari transformasi sosial dari program P2KP di tahun 1999. Beberapa prinsip dasar yang digunakan di P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi juga menjadi prinsip dasar PLPBK. Dalam P2KP, termasuk juga dalam PLPBK, pembangunan manusia adalah fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan, melalui konsep Tridaya pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (SEL).

Intervensi kegiatan PLPBK/ND difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan permukiman miskin di perkotaan/pedesaan melalui pendekatan Tridaya secara komprehensif dan terpadu. Lingkungan permukiman padat, kumuh dan miskin ditata kembali menjadi lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. sebagaimana tertuang dalam skema di bawah ini.

Pada tahap pertama, P2KP berorientasi untuk membangun pondasi “masyarakat berdaya” dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya PNPM-MP melanjutkannya dengan orientasi pada transformasi menuju “masyarakat mandiri” yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok

peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

Gambar 2.6 Intervensi Program PLPBK



Pada tahap terakhir, PLPBK berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat madani” yang dilakukan melalui intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara komprehensif berbasis komunitas atau *Neighbourhood Development (ND)*.¹⁰ Dengan demikian, Kegiatan PLPBK merupakan salah satu intervensi di tahap transformasi menuju masyarakat madani.

1. Tujuan

Tujuan Program PLPBK dibagi menjadi dua yakni secara umum dan secara khusus.¹¹ Secara umum tujuan dari pelaksanaan PLPBK/ND adalah “Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman, sehat dan berkelanjutan”. Secara khusus tujuan Program PLPBK/ND adalah

¹⁰ Pedoman Teknis Program PLPBK 2014, PNPM-MP hlm. 2

¹¹ Ibid, hlm. 3

- a. Mewujudkan perilaku Masyarakat yang hidup sehat, bersih, dan tertib pembangunan serta terencana secara terpadu
- b. Mewujudkan masyarakat yang Kreatif dan Inovatif (*Community Entrepreneurship*) dalam Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan hasil-hasilnya
- c. Mewujudkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) bersama Unit-Unit Pelayanan (UP-UP) yang mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan secara mandiri sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat (*Community Management*);

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan integrasi perencanaan pembangunan;
- b. Penataan lingkungan permukiman miskin berbasis ruang;
- c. Peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin.

2. Lokasi

Lokasi sasaran PLPBK adalah desa atau kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kelurahan/Desa penerima program PNPM Mandiri Perkotaan;
- b. BKM/LKM Berdaya dalam arti BKM/LKM tersebut memiliki kesiapan dan komitmen untuk belajar melaksanakan kegiatan PLPBK;

- c. Kesiapan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.¹²

3. Alokasi Anggaran

Alokasi pagu BLM dibagi menjadi dua tahap yaitu:

- a. Tahap pertama

Dana stimulan diturunkan sebesar 150 juta, digunakan untuk keperluan administrasi, anggaran konsultan, tim pendamping maupun tim ahli.

- b. Tahap kedua

Dana sisa diturunkan yakni sebesar 850 juta digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.¹³

4. Target Output

Adapun target *output* dari pelaksanaan PLPBK/ND adalah:

- a. Dokumen Perencanaan

1. Dokumen perencanaan tingkat kelurahan/desa (makro), disebut sebagai Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau setara dengan dokumen perencanaan jangka menengah kelurahan/desa. RPLP berfungsi sebagai dokumen legal perencanaan kelurahan/desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen RPLP memuat rencana penataan lingkungan permukiman dan strategi pemasaran yang disepakati oleh masyarakat, perangkat kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya dan disahkan oleh Bupati/ Walikota.

¹² Ibid, hlm. 8.

¹³ Ibid, hlm. 9.

2. Dokumen perencanaan kawasan prioritas (mikro), disebut sebagai Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). RTPLP bagian dari RPLP untuk kawasan permukiman miskin yang diprioritaskan.

b. Pranata

1. Aturan Bersama, adalah kesepakatan yang mengikat antara Masyarakat, Perangkat Kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya yang terjadi melalui serangkaian rembug masyarakat.
2. Lembaga-lembaga urusan pembangunan yang berfungsi:
 - Mengorganisasi masyarakat untuk melakukan review terhadap rencana RPLP dan RTPLP setiap tahun dan secara partisipatif melakukan perencanaan tahunan ke depan.
 - Mengawasi pelaksanaan Aturan Bersama dan pengawas bangunan.
 - Mengelola dan memelihara hasil pembangunan (*estate management*) kawasan, baik prasarana dan sarana yang dibangun masyarakat.

c. Fisik bangunan dan lingkungan

Bangunan dan lingkungan permukiman miskin di kawasan prioritas yang lebih tertata dengan pelayanan prasarana dan sarana yang lebih berfungsi.

d. Sosial

Terjadinya perbaikan perilaku hidup sehat, bersih dan produktif sejalan dengan tertatanya kawasan permukiman sebagai wadah kegiatan penghidupan dan kehidupan.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm. 4.

5. Pihak-Pihak Terlibat dalam PLPBK di Desa Wonokerto

a. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)

BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif, yang bertanggung jawab untuk menggerakkan potensi warga masyarakat kelurahan untuk menanggulangi kemiskinan, mempunyai tugas untuk membangun modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal (potensi) yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjejaring di antara sesama warga, maupun dengan pihak luar. BKM yang berada di Desa Wonokerto adalah LKM Wonomulyo.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa meliputi kepala desa beserta perangkat-perangkatnya berperan dalam memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program PLPBK di lingkup wilayah kerjanya dapat berjalan secara maksimal. Pemerintahan desa membantu dan memfasilitasi institusi lain yang terlibat dalam PLPBK agar dapat menjalankan program dengan baik.

c. Tim Inti Perencana dan Pemasaran (TIPP)

Merupakan tim yang terdiri dari pelaku program di level desa antara lain anggota BKM, perangkat desa maupun kelompok peduli. Tugas TIPP adalah bekerjasama dan berkordinasi dengan TAPP, fasilitator, pemerintah desa, BKM dalam tahapan kegiatan seperti menyusun RPLP, RTPLP, RAB, rencana kerja, LPJ . Serta membantu memberikan dampingan dan bantuan teknis kepada TAPP terkait perencanaan dan pemasaran.

Secara substansi TIPP yang berasal dari berbagai latar belakang institusi adalah sebagai wadah bagi desa untuk melakukan pembelajaran dalam menata lingkungan permukiman berbasis komunitas. Selain itu juga pembelajaran dalam berkomunikasi, bermitra, kordinasi serta bersinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli lainnya.

d. Tim Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (TAPP)

Merupakan tenaga ahli individu atau tim yang direkrut oleh BKM untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program PLPBK. Tugas TAPP hanya memfasilitasi masyarakat dalam mengambil keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan. Selain itu TAPP juga bertugas bekerjasama dengan fasilitator, konsultan maupun pemerintah dalam seluruh tahapan kegiatan partisipatif dan pemasaran.

e. Faskel

Fasilitator Kelompok merupakan tenaga ahli yang berada di tingkat Askot. Faskel diperbantukan untuk berada diberbagai desa dibagi wilayah kerjanya. Faskel memiliki berbagai bidang sesuai dengan kemampuannya. Antara lain: teknik, sosial, dan ekonomi. Faskel bertugas untuk pengembangan relawan dan BKM. Kedua, bekerjasama antara BKM dengan institusi lain maupun kelompok peduli. Memberikan kapasitas terhadap masyarakat. Mendampingi masyarakat (KSM) dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

f. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Merupakan pelaksana program sekaligus penerima manfaat dari program PLPBK. KSM adalah kelompok warga masyarakat yang menerima dana BLM

PLPBK diorganisasikan oleh fasilitator dan dibantu berbagai isntitusi lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

g. Relawan

Relawan merupakan penggerak masyarakat yang peduli, mengabdikan dengan ikhlas, dan memiliki komitmen pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Relawan dapat bergabung menjadi bagian TIPP, KSM, ataupun secara aktif berperan dalam setiap kegiatan PLPBK.

BAB III

AKTUALISASI MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PADA PROGRAM PLPBK

A. Proses Pelaksanaan Program PLPBK

Penerimaan program PLPBK di Padukuhan Sangurejo, Desa Wonokerto merupakan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan tahap akhir melalui seleksi pengajuan proposal. Kriteria yang desa terpilih mengandung beberapa unsur antara lain, komitmen pemerintah desa, BKM dan masyarakat. Kinerja BKM yang maksimal. Serta penilaian-penilaian lain. Penerimaan program PLPBK terhitung sejak tanggal diturunkannya SK Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor Np. HL020-Cb/3283 pada tanggal 27 Agustus 2012. Sedangkan pelaksanaan program PLPBK di tingkat desa dimulai saat Loka Karya tingkat desa dan pengukuhan TIPP oleh Kepala Desa dan BKM.

Selanjutnya, proses pembangunan secara fisik (infrastruktur) dikerjakan setelah dana BLM kedua turun antara bulan Agustus 2015 sampai bulan Februari 2016. Kemudian kawasan prioritas tersebut *launching* menjadi Kampung Wisata Gerbang Sangurejo (KAWIGESANG) pada tanggal 19 Maret 2016. Adapun pelaksanaan program PLPBK di Padukuhan Sangurejo dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut antara lain:

1. Tahap Persiapan

a. Sosialisasi Massal

Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan program PLPBK kepada seluruh masyarakat Desa Wonokerto. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah menarik perhatian masyarakat untuk nantinya dapat terlibat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 23 Februari 2014. Diikuti oleh sekitar 300 orang dari berbagai unsur Desa Wonokerto.¹

b. Perekrutan TAPP

Tim Ahli Perencana Partisipatif dan Pemasaran (TAPP) merupakan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam mendampingi desa dalam pelaksanaan program PLPBK. TAPP ini direkrut oleh LKM Wonomulyo dan Pemerintah Desa Wonokerto difasilitasi oleh Tim Koordinator Kabupaten Sleman melalui beberapa tahapan dan persyaratan. Iklan lowongan TAPP diumumkan melalui surat kabar Kedaulatan Rakyat pada tanggal 21 Maret 2014. Adapun TAPP yang terpilih adalah Furqon Rohmad Widodo, S.IP.,S.Sos.I dan Aprilia Pancawati,ST.²

c. Lokakarya

Tujuan diadakannya lokakarya ini adalah membangun kesadaran pentingnya bersinergi serta pemahaman pemerintah kecamatan dan desa beserta elemennya tentang pentingnya pembangunan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 27 Juni 2014. Diikuti oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, seluruh ketua RT/RW, BKM, BPD, LPMD, PKK, Karang taruna. Narasumber kegiatan ini ialah KMW dan tim Teknis

¹ Laporan Akhir PLPBK LKM Wonomulyo 2015, hlm. 15.

² Ibid, hlm. 17.

Pemkab Sleman. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dan pemerintah desa mengetahui dan siap mendukung dan terlibat aktif dalam penyelenggaraan setiap tahapan kegiatan PLPBK diwilayahnya.³

Gambar 3.1 Loka Karya di Tingkat Desa



(Sumber : Dokumentasi PLPBK BKM Wonomulyo 2014)

2. Tahap Perencanaan

a. Refleksi Perkara Kritis

Dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab kepadatan, kekumuhan dan kemiskinan. Kesadaran ini penting sebelum akhirnya masyarakat menyepakati bagaimana sebaiknya program PLPBK dilaksanakan, serta menyepakati bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat miskin bersama komponen masyarakat lainnya dalam memanfaatkan peluang yang ada di PLPBK untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang akan mereka lakukan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014 di Balai Desa Wonokerto. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa mulai dari seluruh dukuh, Ketua RT, Ketua RW di Desa Wonokerto, PKK, LPMD, BPD, Gapoktan,

³ Ibid, hlm. 6.

tokoh agama, Karang Taruna dan Pokja. Berikut adalah indikator kemiskinan berdasar pada Refleksi Perkara Kritis Desa Wonokerto.⁴

Gambar 3.2 Indikator Kemiskinan Desa Wonokerto



(Sumber : Dokumen Laporan Akhir PLPBK LKM Wonomulyo 2015)

b. Penggalian Visi dan Misi

Membangun visi merupakan kegiatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan gambaran lingkungan permukiman ideal di masa mendatang yang akan dicapai sebagai hasil akhir penataan suatu kawasan yang direncanakan. Kegiatan penggalian visi misi ini dilakukan beberapa kali. Persiapan dan perencanaan diadakan di Balai Desa Wonokerto. Hanya unsur BKM, TIPP, TAPP, Faskel, Pemerintah Desa beserta perangkat desa. Kemudian pada acara puncaknya dilakukan di Nggarungan Ground. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah menjaring aspirasi masyarakat mengenai kondisi desa yang di idamkan, diharapkan dan diinginkan.

⁴ Ibid, hlm. 21.

Pada kegiatan ini melibatkan berbagai komponen diantaranya PKK dan anak-anak. Untuk bapak-bapak diadakan penjaringan visi misi melalui FGD. Begitu juga dengan para ibu-ibu. Sedangkan untuk anak-anak, penjaringan aspirasi desa idaman dilakukan dengan lomba menggambar.⁵

Gambar 3.3 Menjaring Aspirasi dan Merumuskan Visi Kampung Impian



(Sumber : Dokumentasi PLPBK BKM Wonomulyo 2014)

c. Pemetaan Swadaya

Pemetaan Swadaya adalah proses pengumpulan data dan identifikasi persoalan serta potensi diseluruh padukuhan di Desa Wonokerto yang dilakukan oleh Pokja, TIPP, Faskel, dengan didampingi oleh Tenaga Ahli (TAPP). Tujuan dari pemetaan swadaya ini adalah mengidentifikasi persoalan dan potensi (sosial, ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) terkait permukiman di seluruh padukuhan. Berikut adalah proses Pemetaan Swadaya.

1. Pembentukan Pokja di Tingkat Padukuhan

Pokja (Kelompok Kerja) dibentuk oleh TIPP. Ditingkat Padukuhan, Pokja terdiri atas: 1) Pokja Tata Ruang, 2) Pokja Perumahan dan Bangunan, 3) Pokja

⁵ Ibid, hlm. 44.

Peningkatan Pelayanan Publik, 4) Pokja Pengembangan Perekonomian dan Perdagangan 5) Pokja Sarana dan Prasarana, dan 6) Pokja Kelembagaan.

2. Pelatihan TIPP dan Pokja

Pelatihan ini diselenggarakan oleh TAPP dan Fasilitator/Pendamping. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan selama 2 hari. Peserta pelatihan ini ialah TIPP dan Pokja. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan agar TIPP dan Pokja mengalami peningkatan kapasitas, selanjutnya memiliki bekal pedoman, metode dan teknis pelaksanaan program PLPBK. Sehingga TIPP dan Pokja dapat melaksanakan peran, tugas dan tanggungjawabnya.

3. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya

Pemetaan Swadaya dilaksanakan di setiap Padukuhan. Dilakukannya ditingkat basis atau padukuhan yang bertujuan agar dalam pengumpulan dan penggalian data sekunder-primer baik potensi serta permasalahan dapat fokus dan akurasi datanya dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini dilakukan oleh Pokja di masing-masing padukuhan yang dibantu oleh relawan dan didampingi oleh TAPP. Data-data yang dipetakan antara lain fungsi pemanfaatan lahan, sarana prasarana, pemukiman, fasilitas umum dan sosial, potensi dan permasalahan, dan lain-lain sehingga membutuhkan waktu sekitar 1 bulan.

4. Survei Lapangan

Proses pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi secara langsung keadaan lingkungan yang disesuaikan dengan data-data primer. Tujuan survei ialah untuk melihat kondisi riil lapangan baik potensi, masalah, dan perencanaan apakah sudah sesuai dengan data dan peta atau belum sehingga hasil

transek bisa melengkapi kekurangan yang ada dalam data dan peta. Kondisi lingkungan yang diamati diantaranya kondisi sarana prasarana (jalan, drainase, talud, penerangan, sanitasi lingkungan), pemanfaatan lahan (pemukiman, industri, ruang terbuka hijau, perdagangan dan jasa, dll.), kondisi fasilitas umum dan sosial, dll

Pemetaan Swadaya ini menghasilkan data persoalan yang akan menjadi bahan review pemetaan swadaya untuk selanjutnya dapat dilakukan skoring dan berbagai pertimbangan guna menetapkan kawasan prioritas.⁶

Gambar 3.4 Pelaksanaan Pemetaan Swadaya



(Sumber : Dokumentasi PLPBK BKM Wonomulyo 2014)

d. Review Pemetaan Swadaya

Peserta dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, LKM, dan TIPP Desa Wonokerto, tokoh dan perwakilan masyarakat di masing – masing RT yang ada di Desa Wonokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil kompilasi data Pemetaan Swadaya. Kemudian mereview dan menyempurnakan data-data yang sudah terkumpul dan mendiskusikan potensi dan masalah di semua aspek. Untuk

⁶ Ibid, hlm. 26

selanjutnya dilakukan skoring⁷ dan pertimbangan-pertimbangan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan.

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan

1. Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RTPL)

Dokumen perencanaan tingkat kelurahan/desa (makro), disebut sebagai Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau setara dengan dokumen perencanaan jangka menengah kelurahan/desa. RPLP berfungsi sebagai dokumen legal perencanaan kelurahan/desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen RPLP memuat rencana penataan lingkungan permukiman dan strategi pemasaran yang disepakati oleh masyarakat, perangkat kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya dan disahkan oleh Bupati/Walikota.

2. Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP)

Dokumen perencanaan kawasan prioritas (mikro), disebut sebagai Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). RTPLP bagian dari RPLP untuk kawasan permukiman miskin yang diprioritaskan.

3. Dokumen Aturan Bersama (AB)

Dokumen Aturan Bersama merupakan bagian dari dokumen RPLP dan RTPLP. 3. Dokumen AB memuat aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dokumen ini bertujuan sebagai pengontrol kegiatan-kegiatan perencanaan dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah dibuat dan disepakati. Aturan-

⁷ Skoring adalah penilaian dengan menjumlah skor beberapa kawasan sesuai indikator kemiskinan daerah setempat. Di Desa Wonokerto terdapat delapan indikator kemiskinan meliputi jumlah kk miskin, akses jalan, sanitasi tidak memadai, rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, penerangan minim, ketersediaan jamban, kandang menyatu dengan permukiman. Kawasan prioritas terpilih dengan skor tertinggi ialah Padukuhan Sangurejo.

aturan ini bersifat mengikat masyarakat walaupun tidak memiliki legalitas hukum. Akan tetapi, akan ada sanksi sosial yang berlaku di masyarakat. Secara garis besar dokumen aturan bersama mengatur kondisi-kondisi lingkungan sebagai berikut

1. Aturan tata kelola pembangunan hunian.
2. Aturan tata kelola pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana (infrastruktur, sanitasi, sampah).
3. Aturan tata kelola fasilitas umum dan sosial yang dibangun atau yang direncanakan.
4. Sanksi-sanksi terhadap aturan-aturan yang dibuat dan disepakati.

Gambar 3.5 Penyusunan RTPLP



(Sumber : Dokumentasi PLPBK BKM Wonomulyo 2014)

f. Uji Publik

Setelah dokumen disusun, selanjutnya dilakukan uji publik. Uji publik dilakukan agar masyarakat mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil dari proses pemetaan swadaya di masing-masing wilayah. Di tahap ini diharapkan masyarakat mampu mengenali, menganalisa dan mencari solusi bersama-sama di lingkungan masing-masing. Tujuan dari tahap ini ialah untuk menyosialisasikan

hasil perencanaan dan menampung tanggapan serta masukan masyarakat untuk melengkapi penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen RPLP dan RTPLP yang telah melewati uji publik nantinya dikoreksi masyarakat secara langsung sehingga bersifat final. Dokumen final tersebut kemudian disepakati dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.

g. Penetapan Kawasan Prioritas

Setelah melakukan *review* mengenai hasil data pemetaan swadaya yang sangat rumit dan panjang prosesnya. Maka setelahnya dilakukan penilaian dengan cermat, maka diputuskan bahwa kawasan prioritas yang layak mendapat bantuan program PLPBK di Desa Wonokerto adalah padukuhan Sangurejo. Kegiatan penetapan ini dilakukan dengan sosialisasi dan komitmen masyarakat kawasan prioritas. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman pentingnya kesiapan komitmen, serta peran semua masyarakat di Desa Wonokerto terutama masyarakat di Padukuhan Sangurejo dalam menjalankan program PLPBK.

Gambar 3.6 Sosialisasi dan Komitmen Masyarakat Kawasan Prioritas



(Sumber : Dokumentasi PLPBK BKM Wonomulyo 2014)

h. Konsep Pengembangan Kawasan Prioritas

Konsep pengembangan kawasan prioritas ini didasarkan pada RTPLP Padukuhan Sangurejo tahun 2015-2019 yang telah disusun dan diuji publik. Berikut adalah konsep pengembangan kawasan prioritas Padukuhan Sangurejo,

1. Visi

Menjadikan Sangurejo sebagai gerbang kawasan wisata Turi yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan berlandaskan pada nilai agama dan budaya.

2. Misi

- a. Mengembangkan ekonomi di Padukuhan Sangurejo melalui potensi lokal berupa perkebunan salak, perdagangan, jasa, industri, wisata dan budaya.
- b. Mengembangkan permukiman yang sehat dan nyaman.
- c. Mewujudkan pola ruang yang seimbang antara fungsi budidaya dan fungsi lindung, guna mencapai pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- e. Menerapkan nilai moral keagamaan dalam seluruh aspek kehidupan.

3. Konsep Perencanaan

Kawasan prioritas yang padat kumuh dan miskin di konsep menjadi sebuah kampung wisata bernama Kawi Gesang. Kawi Gesang adalah akronim dari Kampung Wisata Gerbang Sangurejo yang terinspirasi dari konsep nilai budaya jawa, *kawi* berarti *kawiwitan* atau awal/embrio, sedangkan *gesang* adalah kehidupan. Kawi Gesang bermakna awal mula/permulaan yang akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan ungkapan filosofis dari

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak di semua RT. • Pengolahan hasil ternak ayam menjadi makanan olahan ayam di semua RT.
Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan ikan di pekarangan rumah (pekarangan produktif) untuk ,memenuhi tambahan kebutuhan gizi keluarga dan untuk tambahan penghasilan di semua RT.
Seni Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan seni budaya lokal sebagai daya tarik wisata seperti pencak silat, kesenian hadroh, badui, jemparingan dipusatkan di daerah embung RT 3. • Penyediaan pendopo dan panggung untuk pertunjukan seni dan budaya untuk disuguhkan kepada pengunjung.
Industri Rumah Tangga Olahan Produk Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar produk lokal yaitu salak, ikan dan ayam agar produk tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi. • Pemasaran produk olahan tersebut melalui media internet. (bekerjasama dengan karang taruna)
Perdagangan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran produk lokal serta produk makanan olahan salak, ayam dan ikan di semua RT. • Pengembangan jaringan pemasaran meenggunakan media internet (bekerjasama dengan karang taruna). • Penerangan kawasan perdagangan dan jasa di RT 4,5 dan 6 • Penyediaan kios/pusat kuliner di kawasan Embung dan di Pasar Ikan.
Permukiman Pedesaan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan sanitasi • Pengolahan sampah organik-anorganik • Menjaga kawasan lindung, RTH publik • Mitigasi bencana • Pengembangan homestay • Perbaikan sarana prasarana seperti jalan dan saluran drainase • Penyediaan lampu penerangan jalan • Sarana sanitasi, tempat sampah dan WC umum.

(Sumber : Dokumen Laporan Pemasaran TIPP 2016)

3. Tahap Pembangunan

a. Pemasaran PLPBK

Pemasaran hasil perencanaan PLPBK tidak serta merta kegiatan pencarian dana (*fundrising*) saja, akan tetapi kegiatan ini berorientasi pada pengembangan masyarakat (*community development*), pendidikan (*education*) dan upaya “menjual” gagasan perubahan sosial melalui pengembangan kawasan berbasis komunitas. Pemasaran ini menjadi media pembelajaran, praktek dan

berkembangnya komunikasi, pengetahuan dan skill masyarakat setempat untuk dapat melihat potensi dalam mencapai suatu tujuan. Setidaknya ada tiga kelompok sasaran dalam pemasaran PLPBK.

Pertama yaitu warga, diharapkan warga berkomitmen untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku untuk mampu menjadi subjek dalam pembangunan dan pengembangan wilayahnya sendiri. Sehingga masyarakat akan berada pada tatanan masyarakat madani. Kedua, yaitu BKM dan pemerintah desa dengan tujuan terciptanya kesadaran, keyakinan dan komitmen serta kontribusi pada pembangunan desa juga pengelolaan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Ketiga yaitu mitra dengan tujuannya ialah terkomunikasikannya hasil-hasil perencanaan pembangunan yang secara partisipatif disusun oleh masyarakat kepada mitra-mitra potensial (seperti pemerintah, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dll.).

Selain itu, diharapkan komitmen dan kesepakatan dari mitra untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan PLPBK. Ada dua kegiatan dalam pemasaran sosial. Pertama yaitu diseminasi gagasan tentang tatanan sosial maupun tatanan ekonomi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa Wonokerto (pemasaran internal). Kedua yaitu memasarkan ide, gagasan tentang perubahan fisik dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam program pembangunan permukiman beserta kawasan-kawasan prioritasnya (pemasaran eksternal).

Akan tetapi, TIPP belum berhasil mendapatkan dana investasi baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perubahan regulasi

tentang pemberian dana dari pemerintah akibat pergantian kepemimpinan nasional. Meskipun demikian terus berusaha menjalin kemitraan dengan berbagai pihak agar program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 3.2 Kegiatan Pemasaran PLPBK

Pemasaran Internal	Pemasaran Eksternal
1. Diseminasi Gagasan 2. Audiensi dengan Wabup Sleman 3. Audiensi dengan SKPD Kab. Sleman 4. Sarasehan dengan SKPD, Wabup dan tokoh masyarakat kawasan prioritas 5. Rapat sinergitas program pemda dengan STIBANK 6. Studi Banding ke Boro Kulon Progo	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal Seni Budaya Gerjen ke Dinas Pariwisata DIY • Proposal Sentra Kerajinan Batako ke Disperindakop DIY • Proposal dan pengiriman program pelatihan kuliner untuk Ibu-ibu ke BLKPP DIY • Proposal dan audiensi dengan pihak STIEBBANK Yogyakarta • Proposal untuk LSM KoHi Indonesia untuk program tim outbound RTH Sendang Tirta Guno • Proposal untuk Rumah Sinergi Indonesia program pendampingan ekonomi desa • Proposal Sentra Emping Desa margomulyo • Proposal P-IRT ke Dinas kesehatan Kab. Sleman • Proposal Sentra Usaha kerajinan batako ke Disperindakop Kabupaten Sleman • Proposal Drainase dan Pengaspalan Jalan Gerjen • Pembuatan Proposal Penerangan Jalan Lingkungan ke Dinas Perhubungan Kab. Sleman

(Sumber : Dokumen Laporan Akhir PLPBK LKM Wonomulyo 2015)

b. Pembangunan Infrastruktur

Berikut adalah tahapan pembangunan infrastruktur program PLPBK di kawasan prioritas Sangurejo:

1. Pengukuran

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui luas lokasi yang akan dibangun secara tepat sesuai dengan perencanaan.

2. Penyusunan DED

DED adalah *Detail Engineering Design*. DED berasal dari dokumen yang telah final disepakati bersama oleh masyarakat serta memiliki legalitas formal. Penyusunan DED dilakukan oleh Tim yang terdiri atas TIPP, masyarakat dan tenaga profesional. DED disusun dengan tahapan

- a. Gambar siteplan/masterplan (skala 1:100 dan 1:200)
- b. Gambar 2 dimensi dan 3 dimensi (visualisasi)
- c. Gambar detail skala 1:10 dan 1:20
- d. Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

3. Kebutuhan Analisa Bahan dan Tenaga

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- b. Pembuatan RKS disesuaikan dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan dengan permasalahan, tenaga, bahan dan sistem kerja/tahapan pengerjaan yang akan dilakukan.

4. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibagi menjadi 5 bidang. Masing-masing memiliki tugas dan kewajiban. Tiap-tiap KSM memiliki rekening masing-masing. Dan bertanggungjawab atas tugas masing-masing. Akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dibawah BKM dan TIPP. Sebagaimana layaknya organisasi, struktur KSM meliputi Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Pelaksana

Teknik, Pelaksana Lapangan, Sie Pengadaan, Ketua Regu Kerja dan anggota. Setiap KSM beranggotakan 12 Orang. Dengan demikian jumlah masyarakat yang terlibat dalam KSM ialah sebanyak 60 orang. Masyarakat Sangurejo yang tidak terlibat dalam KSM inilah tenaga kerja sukarela/gotong royong. Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan KSM beserta masyarakat adalah penerangan, saluran irigasi, pelebaran jalan, *foodcourt*, pendopo Embung Kali Aji, toilet umum, *septic tank* kelompok, ruang terbuka hijau. Selain itu juga penambahan fasilitas umum seperti papan informasi, tempat sampah dan sebagainya.

5. Proses Pembangunan

Proses pembangunan secara fisik (infrastruktur) dikerjakan setelah dana BLM kedua turun yakni berlangsung antara bulan Agustus 2015 sampai bulan Februari 2016. Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh masyarakat sendiri. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama tenaga kerja profesional seperti tukang. Kedua tenaga kerja sukarela. Tenaga kerja profesional seperti tukang dibagi per KSM. Tenaga kerja seperti tukang memang dibayar, tetapi tidak secara penuh. Pengerjaan ini disebut sebagai kerja swadaya. Proses pembangunan infrastruktur dilakukan oleh masyarakat setempat dengan wadah KSM sebanyak 5 kelompok yang diberi nama KAWIGESANG 1 hingga KAWIGESANG 5. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan membagi berbagai sektor sebagaimana telah dirancang dalam penyusunan RTPLP.⁸

⁸ Ibid, hlm. 56

Gambar 3.8 Proses Pelaksanaan Pembangunan Fisik

Infrastruktur	Sebelum	Proses Pembangunan
Pendopo		
Taman Baca		
Foodcourt		
Kolam		
Panggung		
Drainase		
MCK		
RTH		
Jalan		

(Sumber : Dokumentasi PLPBK BKM Wonomulyo 2015)

4. Tahap Keberlanjutan

a. Monitoring dan Evaluasi

Setiap pelaksanaan suatu program pemberdayaan masyarakat memerlukan target dan indikator yang harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan program. Untuk itu, diperlukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang secara khusus melihat perkembangan pencapaian target dan indikator PLPBK secara konsisten dan terbuka. Dalam program PLPBK, monitoring dan evaluasi disebut sebagai “uji petik”. Kegiatan ini dilakukan selama proses pelaksanaan dari awal hingga program tersebut diresmikan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PLPBK dilakukan melalui

1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat
2. Pemantauan oleh Pemerintah yang Berwenang
3. Pemantauan oleh Konsultan dan Fasilitator

b. *Launching* Program PLPBK

Kegiatan *launching* merupakan titik puncak pemasaran program PLPBK. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan hasil pembangunan baik fisik, sosial maupun lingkungan kawasan prioritas. Kegiatan ini dikemas dengan gelar potensi dan budaya dengan nama “Babad Kawi Gesang”. Konsep besar itu dilaksanakan dalam kegiatan seremonial Babad Kawi Gesang yang dibuka oleh Wakil Bupati Sleman pada tanggal 19 Maret 2016. Selain untuk menginformasikan dan mensosialisasikan program PLPBK yang ada di Wonokerto, kegiatan ini juga untuk memperoleh dukungan dana maupun dukungan regulasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan program.

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Babad Kawi Gesang

Hari. Tanggal	Waktu	Kegiatan
Sabtu, 19 Maret 2016	08.00-15.00	1. Penandatanganan Prasasti Peresmian oleh Bupati Sleman (diwakili Wabup) 2. Pengukuhan Organisasi Pengelola (OP) di Sangurejo 3. Pameran Potensi Lokal 4. Pentas Seni dan Budaya
Minggu, 20 Maret 2016	08.00-12.00	1. Gelar Senam Massal 2. Pameran Potensi Lokal 3. Lomba Kicau Burung

(Sumber : Dokumentasi PLPBK BKM Wonomulyo 2016)

Gambar 3.9 Kegiatan Babad Kawi Gesang

(Sumber : Dokumentasi PLPBK BKM Wonomulyo 2016)

B. Bentuk-Bentuk Modal Sosial Masyarakat

Munculnya ide peulisan tentang modal sosial adalah suatu respon peneliti terhadap semakin merenggangnya hubungan antar manusia dan semakin meningkatnya ketidakpedulian terhadap sesama manusia sekarang ini. Manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, melainkan dikelilingi oleh komunitasnya dan masyarakatnya. Sudah menjadi kodrat manusia hidup membutuhkan bantuan manusia lain. Untuk itu secara alami manusia akan melakukan interaksi dengan sesama manusia lainnya dan lingkungan sekitar untuk melangsungkan kehidupannya.⁹ Melalui interaksi sosial inilah yang menimbulkan munculnya modal sosial.

Modal sosial akan terlihat ketika sekelompok manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya pola hubungan sosial inilah yang menjadi dasar masyarakat untuk mengatasi masalah secara kolektif. Dengan demikian, modal sosial merupakan salah satu sumberdaya sosial yang ada di masyarakat. Ketika masyarakat menyadari pentingnya sumberdaya sosial ini digunakan, maka akan membuat pembangunan menjadi efektif dan efisien. Dalam penerapannya modal sosial sangat penting perannya dalam pelaksanaan program PLPBK di kawasan prioritas Padukuhan Sangurejo, Desa Wonokerto. Modal sosial tersebut terdiri atas beberapa unsur, antara lain:

1. Kepercayaan Masyarakat

Menurut Fukuyama, modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum didalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu

⁹ Tri Astuty, Sosiologi : Rangkuman Intisari Sosiologi, cet. 1 (Jakarta : Vicosta Publishing, 2015), hlm. 151

darinya.¹⁰ Fukuyama juga berpendapat bahwa kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas atau masyarakat tersebut.¹¹ Dalam pelaksanaan program PLPBK di Sangurejo, harapan untuk adanya perilaku jujur, teratur dan patuh pada norma tersebut diimplementasikan masyarakat Sangurejo saat memilih anggota-anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagaimana disampaikan oleh Pak Budiono:

itu kumpulan masyarakat, trus di hadiri dari TIPP, tapi hanya perwakilan dari ketua, pak narjo itu. Trus ternyata disitu diajak voting mas, wong yang namanya di masyarakat itu sopo seng gelem. Lha ternyata kulo ndumuk bu titik ya oke, pak dhe sur yo oke, temen-temen ya seng gelem mas, kalau di suruh nunjuk dari saya aja ngak ada yang mau, termasuk saya kalau di suruh ya ngak mau.¹²

Pembentukan KSM diawali dengan lokakarya di tingkat padukuhan, dihadiri oleh berbagai unsur dalam program PLPBK salah satunya ialah TIPP, pendamping, TAPP, relawan, dan warga masyarakat Sangurejo. KSM merupakan ujung tombak dalam program PLPBK. KSM merupakan panitia pelaksana sekaligus penerima manfaat (*beneficiaries*) dari program PLPBK. Dalam pembentukan anggota KSM dibutuhkan kepercayaan sesama anggota, sehingga menimbulkan suatu kepercayaan umum. Karena KSM lah yang nanti akan mengelola bantuan dana tersebut. Anggota masyarakat diajak memilih orang-orang yang diharapkan mampu, jujur, dan bertanggungjawab dalam mengemban

¹⁰ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, terj. Ruslani (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 37.

¹¹ Ibid, hlm. 36.

¹² Wawancara Pak Budiono, Anggota TIPP/KSM, pada tgl 22 Mei 2017

amanah menjadi anggota KSM. Pada akhirnya masyarakat sendirilah yang menentukan orang-orang yang dipercaya dalam memilih anggota KSM. Seperti disampaikan Pak Budiono:

Itu juga dari lembaga masyarakat. Semua masyarakat disini yang memang tidak asal-asalan jadi memang menunjuk orang yang sekiranya bisa dipercaya mas.¹³

Modal sosial bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar hingga kelompok-kelompok masyarakat paling besar, negara, dan dalam kelompok lain yang ada diantaranya.¹⁴ Dapat dipahami bahwa kapabilitas tersebut mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan besar seperti negara hingga lingkup yang paling kecil yakni komunitas masyarakat lokal. Adanya korupsi, penyelewengan anggaran, kecurangan, penegakan hukum tebang pilih pada elite nasional yang diberitakan diberbagai media di Indonesia setiap hari, sebenarnya berdampak pada erosinya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegakan hukum hingga level bawah, salah satunya pada komunitas.

Erosi kepercayaan tersebut melunturkan modal sosial di masyarakat akibat ulah oknum-oknum yang melanggar dan menciderai kepercayaan umum. Dampak adanya peristiwa tersebut terbawa arus dan merambah masuk dalam lingkup komunitas lokal sehingga menyebabkan ketakutan dan ketidakpercayaan diri didalam masyarakat ketika masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola program. Sebagaimana masyarakat Sangurejo ketika mendapatkan bantuan dana stimulan program PLPBK sebesar 1 milyar, seperti disampaikan oleh Pak Sehad:

¹³ Wawancara Pak Budiono, Anggota TIPP/KSM, pada tgl 22 Mei 2017

¹⁴ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial*, hlm 37

*cuman kan kalo kita mendengar isu-isu tentang adanya korupsi, tentang adanya kesalahan. Takutnya kalo ada uang masyarakat luas, jangan-jangan nanti hal-hal seperti itu disalahgunakan sesukono BPK atau mungkin ada badan pengawas yang lain, atau mungkin ada intelegen ngopo niliki. Mbok ndarani dana iki nggo neko-neko nggo kekayaan pribadi, jangan lah saya katakana seperti itu. Nah makanya kita masih kalo ada hal-hal seperti itu ternyata pendamping sangat-sangat dibutuhkan nggo ngarahke. Kan jenenge wong ndeso kan masih awam mengerjakan.*¹⁵

Masyarakat Sangurejo sempat memiliki rasa pesimis, tidak percaya diri dan takut. Sebetulnya ketakutan-ketakutan tersebut adalah bentuk kehati-hatian masyarakat dalam melaksanakan program. Kehati-hatian ini merupakan wujud masyarakat menjunjung nilai kejujuran dan memegang teguh norma yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Rasa pesimis, takut dan tidak percaya diri akhirnya dapat diatasi dengan bermitra atau kerjasama dengan berbagai unsur dalam program PLPBK, salah satunya ialah pendamping/faskel. Sebagaimana disampaikan Pak Budiono:

*Tapi sebenarnya saya sempat ada rasa takut lah untuk pengelolaan uang sebesar itu, karena apa ya, bisa membayangkan wong uang 10-20 juta aja belum pernah mengerjakan, itu kalau saya lo, kok disuruh mengelola uang sebesar itu ya sempat merasa takut, tapi rasa takut itu trus hilang mas, hilang karena ada pendamping, ada TIPP dan lain sebagainya itu sehingga banyak mitranya disini.*¹⁶

Pernyataan tersebut membuktikan pentingnya kepercayaan diri dimulai dengan membangun asosiasi dan kerjasama untuk mengorganisasikan kinerjanya berbasis kelompok. Dengan berkelompok permasalahan akan dihadapi bersama. Sehingga permasalahan akan lebih mudah diatasi.

¹⁵ Wawancara dengan Pak Sehadi, Dukuh Sangurejo pada tanggal 23 Mei 2017

¹⁶ Wawancara dengan Pak Budiono, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 22 Mei 2017

Fukuyama menjelaskan masyarakat yang memiliki *high-trust* bisa mengorganisasikan kerjanya dengan basis yang lebih fleksibel dan berorientasi kelompok, dengan pertanggungjawaban yang lebih banyak didelegasikan pada tingkat-tingkat organisasi yang lebih rendah. Sebaliknya masyarakat yang *low-trust* harus mengekang dan mengisolasi para pekerjanya dengan serangkaian aturan-aturan birokratis. Padahal para pekerja biasanya menemukan kerja yang lebih memuaskan jika mereka diperlakukan seperti orang dewasa yang bisa dipercaya untuk memberi kontribusi pada komunitas daripada diperlakukan seperti mesin industri.¹⁷ Menurut penulis, dalam melaksanakan program PLPBK, masyarakat Sangurejo termasuk kategori memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi hal ini dibuktikan dengan pendelegasian tugas pada tingkat level bawah seperti dibaginya rekening Bank per KSM. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Purwanto:

langsung masuk rekening BKM, kalau PLBBK membutuhkan dana untuk pembangunan nanti mintanya dengan LKM pakai RPD, jadi kalau RPD udah jadi disodorkan ke LKM butuh sekian trus nanti dari LKM nransfer dari bank, dari BRI rekeningnya nanti turun ke rekening dari KSM yang ada di Sangurejo. ya atas nama masing-masing, KSM 1, KSM 2, KSM 3, KSM 4, KSM 5 itu pegang peran masing-masing. Satunya pegang jalan, pemukiman, embung, penerangan jalan dan untuk jamban.¹⁸

Pak Budiono juga menambahkan:

Dadi masing-masing KSM belanja sendiri, tanggung jawab administrasi sendiri, sampai laporan selesai. Kemudian selesai laporan baru di handle satu pembukuan. Dadi initinya yo setiap KSM melaksanakan kegiatan masing-masing mulai dari 0 sampai akhir. Intinya seperti itu karena cuma lancarnya pekerjaan itu bisa

¹⁷ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial*, hlm 44

¹⁸ Wawancara dengan Pak Purwanto, Kordinator BKM Wonomulyo pada tanggal 2 Mei

dilakukan bersamaan, bisa dilakukan secara masing-masing KSM.¹⁹

Dengan diberikannya kesempatan dan kepercayaan pada masyarakat untuk mengelola anggaran tersebut, menjadikan masyarakat tumbuh rasa tanggung jawab, tumbuhnya kejujuran dan saling percaya antar masyarakat. Karena masyarakat diberi tempat inilah, masyarakat merasa puas. Disebabkan masyarakat dapat mengetahui proses dan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan program PLPBK secara jujur dan terbuka. Sebagaimana disampaikan Pak Sehadi:

Yang jelas dari sisi manfaat itu. Hikmah dari PLPBK itu besar sekali manfaatnya, kemudian masyarakat juga puas dengan adanya dipasrahi duit, tapi yo ketar-ketir juga takutnya salah, takutnya nanti oleh ngerjakan, kok ojo-ojo dadi kasus dadi masalah. Jadi, udahlah yang penting kita apa adanya. Sing penting beli ini, ada barange ini, dipasang itu, ada fotonya, saya gitukan. Kan orang bodo kan biar saya jawab bodo seperti itukan. Ya yang penting jujur lah, ya kalo jujur in shaa allah ndak apa-apa. Jangan di pikirkan uangnya kemana nggak usah. Toh, kalo nanti ada pembangunan yang bagus yang merasakan juga kita bukan siapa-siapa.

Ketika masyarakat diberikan kesempatan terlibat dalam pembangunan termasuk dalam mengelola anggaran, secara tidak langsung telah terjadi penggunaan modal sosial. salah satunya ialah bersikap jujur dan saling percaya pada masyarakat.

Memang dalam setiap pembangunan pasti ada pro kontra. Kenyataan dilapangan memang ada oknum yang tidak berkenan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Titik selaku Bendahara:

Terus mungkin saya sebagai bendahara kadang kan juga nggak tau yah ibu-ibu nggak tau, wah seneng yah megang uang gitu loh. Kita kan megang uang kan harus ada laporan keluar masuk uang

¹⁹ Wawancara dengan Pak Budiono, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 22 Mei 2017

kan harus ada kuitansi, ada ini kan tidak bebas gitu loh. Sampe yang terutama yang pas awal-awal kerja saya nggak peduli banget si, soalnya saya orangnya nggak begitu tak rasake yo mas. Karena saya itu prinsipnya yang penting saya itu benar, saya kalo ada orang ngomong saya langsung kasih tau. Jadi saya langsung gitu loh. Tapi kadang saya nggak tau, tapi ada yang berkomentar saya jelaskan ini ini ini.²⁰

Bendahara merupakan posisi yang sangat sensitif. Adanya komentar di luar memang wajar. Akan tetapi semua itu dapat dijelaskan secara fakta dan data. Bendahara merupakan jabatan yang diamanahkan dengan penuh kepercayaan. Bendahara dalam PLPBK juga memiliki aturan yang profesional, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Adanya oknum yang kontra adalah keniscayaan adanya. Justru dengan momentum program PLPBK ini *mindset* negatif tentang prasangka-prasangka buruk ini harus diluruskan. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Andi:

setiap pembangunan pasti menimbulkan ketidak selarasan tapi bisa diselaraskan, jadi adanya konflik, adanya komplain, adanya prasangka itu kan memang hal yang bisa dijelaskan baik oleh masyarakat yang terlibat di KSM atau yang terlibat di awal, ini kan pembangunan bukan hanya fisik tapi juga pembangunan sosial, itu juga diharap bisa merubah prilaku-prilaku yang seperti itu, jadi ketika ada ini, ini justru itu ada prilaku yang ndak sesuai.²¹

Berawal dari program PLPBK ini, unsur-unsur sentimen dalam pembangunan di Padukuhan Sangurejo ini dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Metode yang tepat ialah dengan memberikan segala informasi secara jujur dan terbuka. Dengan memberikan informasi yang jelas dan bertanggungjawab, maka masyarakat akan saling percaya.

²⁰ Wawancara dengan Bu Titik, Bendahara KSM pada tanggal 22 Mei 2017

²¹ Wawancara dengan Mas Andi, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 11 Mei 2017

Selain memiliki saling percaya terhadap sesama anggota masyarakat, kepercayaan juga muncul terhadap pemerintah lokal maupun daerah. Dengan modal jujur dan saling percaya ini, maka masyarakat dapat membangun kerjasama dengan pemerintah lokal. Kerjasama ini sangat penting karena menyangkut kelangsungan kehidupan masyarakat lokal, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat tidak terlepas dari pemerintah. Sebagaimana disampaikan Pak Sehadi:

*Jadikan kalo dikerjakan masyarakat, nggak ada kesan dijupuk pak dukuh dijupuk pak lurah. Ya sebenarnya dan itu misal cairnya 1 juta, ya bener dikasihkan 1 juta. Misal ada semacam pajak, itukan kalo masyarakat yang udah pernah, kan tau sendiri, oh kalo belanja kena pajak. Jangan sampe wong awam taunya kalo pajak itu dipotong wong gede.*²²

Melalui keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program PLPBK meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola dana. Hal ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi masyarakat Sangurejo. Persepsi jika setiap proyek pasti dipotong pada pos-pos tertentu, persepsi pesimis tersebut terbantahkan. Akhirnya masyarakat sendirilah yang melakukan pengelolaan anggaran. Sehingga menumbuhkan kepercayaan antar sesama masyarakat dan pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Akhirnya, dengan modal saling kepercayaan inilah dapat memicu sinergisitas sehingga memperluas jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kesatuan kerjasama maka pembangunan akan lebih cepat dan tepat dilakukan.

Kepercayaan membuat perilaku individu-individu bertindak jujur dan mematuhi segala aturan. Kepercayaan tersebut mempererat simpul-simpul ikatan

²² Wawancara dengan Pak Sehadi, Dukuh Sangurejo pada tanggal 23 Mei 2017

sosial sehingga antar komponen tersebut timbul kerjasama dalam pelaksanaan program.. Sehingga energi kita tidak habis untuk berprasangka atau mengawasi anggota masyarakat lainnya. Akhirnya energi akan tercurahkan untuk fokus dalam menyelesaikan program dan hasil pembangunan tercapai secara maksimal.

2. Jaringan Sosial

Menurut Fukuyama jaringan merupakan kemampuan berasosiasi (berhubungan satu dengan yang lain) menjadi modal yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, tetapi juga untuk aspek eksistensi sosial lainnya.²³ Terbukti ketika masyarakat mendapatkan bantuan program PLPBK, masyarakat merasa senang kemudian berasosiasi terhadap anggota masyarakat yang lain dan turut terlibat dalam program sebagaimana disampaikan oleh Pak Sehad:

*Kalo saya lebih suka dikasih seperti program PLPBK, karena disitu kan masyarakat yang akan menerima pembangunan itu sehingga untuk pengerjaan benar-benar bisa maksimal terutama untuk kualitas. Kemudian yang kedua, yang tenaga yang seharusnya kalo mungkin kalo diborong tenaga dihitung, kalo itu kan bisa swadaya. Sehingga nanti dongen nggone nggo nggajih tenaga, bisa dapat semen, bisa dapat pasir kan begitu istilahe.*²⁴

Keterlibatan dan swadaya masyarakat ini merupakan bentuk kemampuan masyarakat dalam berasosiasi. Kemampuan berasosiasi ini menjadikan pengerjaan dapat maksimal serta berkualitas. Di sisi lain kemampuan berasosiasi juga penting dalam nilai ekonomis. Seperti masyarakat swadaya untuk pembangunan, yang seharusnya untuk menggaji tukang bisa digunakan untuk menambah material. Dengan begitu pembangunan dapat maksimal. Bukti lainnya juga disampaikan oleh Mas Andi:

²³ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial*, hlm. 13

²⁴ Wawancara dengan Pak Sehad, Dukuh Sangurejo pada tanggal 23 Mei 2017

yakan karena memang PLBBK sebenarnya stimulan, bukan 100% dibiayai oleh PLBBK, kalau harus memenuhi konsumsi 1 tahun itu sudah berapa puluh juta, trus untuk menyiapkan lahan itu sudah hampir berapa ratus juta, karena men power dari sdmnya kalau dari pandangan saya kalau seluruh pembangunan itu berbayar semua uang 1 M itu tidak ada apa-apanyanya, bisa uang 25-30% jadi untuk bayar tukang, sehingga bangunan tidak jadi di kerjakan, sehingga kalau kemaren itu peran serta masyarakat penambahannya bisa sampai 25-30 %, karena mengurangi pekerjaan yang di gotong royongkan malem-malem, pagi-pagi atau sore-sore dan siangya kerja.²⁵

Dimensi jaringan atau berasosiasi ini sangat meminimalisir anggaran yang ada. Bisa dibayangkan konsumsi yang dikeluarkan untuk pertemuan, forum, pelatihan, rapat, rembug warga yang pelaksanaannya hingga ratusan kali. Belum lagi untuk *memback up* logistik sewaktu tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jika harus mengeluarkan anggaran, berapa rupiah yang telah dipotong untuk urusan logistik. Hal tersebut belum termasuk untuk menggaji tenaga kerja. Bentuk jaringan ternyata juga dapat memicu anggota masyarakat dalam menumbuhkan solidaritas. Sebagaimana disampaikan Bu Titik dan Pak Budiono dalam FGD:

kasian lah nyambut gawe kok ngak ada ynag ngasih minum atau apa, itu dari lingkungan peduli lah dengan memberikan snack atau minum, dari masyarakat sendiri dengan kesadaran sendiri tanpa di koordinasi.²⁶

Kemudian Pak Budi menambahkan:

nah ini kesadaran kita awakdewe kok mesakke kita kasih minum, oh mesakke wenehi bakwan.²⁷

(masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk memberi minum dan bakwan pada masyarakat yang gotong royong karena dana PLPBK tidak diperbolehkan untuk konsumsi.)

²⁵ Wawancara dengan Mas Andi, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 11 Mei 2017

²⁶ Wawancara dengan Bu Titik, Bendahara KSM pada tanggal 22 Mei 2017

²⁷ Wawancara dengan Pak Budiono, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 22 Mei 2017

Jaringan masyarakat Sangurejo yang berbentuk asosiasi-asosiasi hubungan telah terbukti menekan anggaran biaya operasional, seperti biaya pekerja dan biaya konsumsi. Jika orang-orang di dalam organisasi bekerja dengan saling mempercayai dan bekerja menurut serangkaian norma-norma etis bersama, maka masyarakat tersebut akan mampu berinovasi secara organisasional, karena tingkat kepercayaan yang tinggi akan memungkinkan munculnya varietas hubungan yang lebih luas.²⁸ Varietas hubungan jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama.

Komunitas-komunitas bergantung pada sikap saling percaya dan tidak akan muncul spontan tanpanya. Karena komunitas bergantung pada kepercayaan dan kepercayaan ditentukan secara kultural.²⁹ Gotong royong merupakan warisan secara kultural bangsa nusantara. Gotong-royong tersebut didasari adanya nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama. Karena gotong royong didasari oleh saling percaya maka, kepercayaan akan menekan biaya transaksi antar orang yang artinya adalah efisiensi penggunaan sumberdaya. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Purwanto:

Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan setelah petugas yang ngasih dana itu turun ke lapangan dia geleng-geleng kepala kok bisa megah seperti ini, padahal dana yang diberikan hanya sekian. Padahal kalau dipandang dari dana yang Cuma sekian kok bisa sekian megahnya. Kan semua itu juga dapat dari bantuan masyarakat. Kalo misalnya nanti ada wuruk jalan nanti masyarakat bisa turun bareng-bareng gotong royong, kemudian untuk buat sobrok itu juga dari masyarakat turun ke lapangan jadi

²⁸Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial*, hlm. 39

²⁹ Ibid, hlm. 36

*untuk menekan dana tadi sehingga untuk memaksimalkan dana yang ada.*³⁰

Mas Andi Menambahkan:

*jadi asumsi 4 Milyar itu perencanaan kita, semua fasilitas terbangun. Jadi kalau untuk bangun seperti ini, ini kan masih menyisakan pembangunan perencanaan. Kalau yang sudah terbangun dan kalau semua berbayar sekitar 2 milyar.*³¹

Gotong royong merupakan jaringan masyarakat tingkat tinggi dalam masyarakat Indonesia. Bahkan jika dikupas secara mendalam, Presiden Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu adalah gotong royong. Dengan demikian selain fungsi jaringan sebagai salah satu unsur modal sosial yang dapat menunjang kerjasama dalam pembangunan. Fungsi lain lain jaringan ialah mempertahankan eksistensi sosial lainnya. Salah Eksistensi sosial lain di Sangurejo ialah gotong royong tersebut. Tidak harus kaya untuk terlibat gotong royong, tidak harus pandai mencapai perguruan tinggi dalam turut serta dalam gotong royong. Tetapi gotong royong adalah sebagaimana disampaikan oleh Pak Budiono:

*ora mung seng iso teko seng nduwe pikiran yo pikirane, seng nduwe duwet yo duwite , trus seng iso tenogone yo tenogone, itu namanya gotong royong.*³²

(gotong royong tidak hanya yang datang saja, tetapi dapat berkontribusi melalui pemikiran, yang punya uang bisa dengan uangnya, yang punya tenaga dengan tenaganya itu yang dinamakan gotong royong)

Hubungan sosial antar anggota masyarakat yang terjalin dalam kehidupan masyarakat sehari-sehari dengan kurun waktu yang relatif lama. Interaksi sosial yang dibangun pada gotong royong bukanlah proses yang instan, sehingga

³⁰ Wawancara dengan Pak Purwanto, Kordinator BKM Wonomulyo pada tanggal 2 Mei 2017

³¹ Wawancara dengan Mas Andi, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 11 Mei 2017

³² Wawancara dengan Pak Budiono, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 22 Mei 2017

hubungan sosial tersebut dapat menghasilkan kerjasama yang kuat. Kegotong-royongan masyarakat Sangurejo sudah tidak perlu diragukan lagi, ini juga dibenarkan oleh Mas Aziz sebagai Faskel/Pendamping

ya itu tadi mas, kita liat mungkin disitu foto-foto gotong royong, jadi sebelum mulai itu dia sudah bongkar jalan, gotong-royong. Kalau di tempat lain mohon maaf, kita ngak menjelek-jelekkan karena kalau di tempat lain itu lokasi PLPBK ini ngak di tengah kampung mas, kalau yang di tempat lain karena ngak di tengah kampung gitu jadi kebanyakan dari gali dan lain-lain mereka dibayarkan, jadi swadayanya ada tapi mereka sedikit banget. Jadi gregetnya hanya orang-orang tertentu yang mau mengurus, kalau di Sangurejo kan banyak yang ngurusi bahkan KSM pun semuanya ikut gotong royong, ikut berkecimpung disitu.³³

Unsur jaringan memberi banyak manfaat pada modal sosial masyarakat Sangurejo. Jaringan sosial menumbuhkan munculnya solidaritas dan partisipasi. Pada tingkatan yang lebih tinggi, jaringan sosial juga mempertahankan eksistensi sosial yakni gotong royong. Jaringan juga penting bagi efisiensi ekonomi pada pembangunan PLPBK di Sangurejo sehingga pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

3. Aturan Bersama

Beberapa *output* adanya program PLPBK adalah adanya infrastruktur yang menunjang kehidupan masyarakat miskin serta pranata aturan yang disepakati untuk menjaga hasil yang telah diperoleh dari program PLPBK. Dalam proses pembangunan fisik maupun pembangunan sumberdaya manusia, pastinya pelaksana akan berbenturan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut tentunya ada yang berdampak pada keberhasilan

³³ Wawancara dengan Mas Aziz, Tim Pendamping/Faskel pada tanggal 10 Mei 2017

program PLPBK. Untuk itulah diperlukannya membuat norma berupa aturan yang disepakati bersama sebagai norma baru yang dapat menunjang keberhasilan program.

Menurut Fukuyama norma merupakan aturan yang ditemukan komunitas bersifat etis-norma normatif yang membuat kepentingan-kepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok.³⁴ Menurut Fukuyama tersebut keberhasilan kekuatan kepercayaan dan jaringan diukur dengan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma dan nilai-nilai bersama.

Sebagaimana penjelasan Fukuyama diatas, kepercayaan dan jaringan dapat dikatakan berhasil jika kepentingan individual yang merusak program tersebut harus tunduk pada kepentingan komunitas kelompok. Seperti yang terjadi di Sangurejo. Terdapat warga yang memelihara ayam dengan posisi kandang diatas sungai yang dijadikan kolam ikan. Dengan maksud kotoran dapat dimakan ikan. Akan tetapi jumlah kotoran tidak sebanding dengan jumlah ikan. Demi mewujudkan kawasan pemukiman yang bersih dan sehat, yang kemudian berorientasi menjadi desa wisata. Maka, sesuai kesepakatan dan peraturan bersama, pemeliharaan ayam diatas sungai dilarang. Sebagaimana di sampaikan oleh Pak Bambang:

*Pemeliharaan ayam diatas sungai ditutup kan bawahnya kolam, trus kandang itu kan berdekatan dengan saluran irigasi harapannya di enggokke tapi kan ngak sebanding antara kotoran yang masuk ke kolam dengan yang dimakan ikan, akhirnya kan banyak kotoran yang larinya kesaluran lagi, lha akhirnya otomatis sepakat ditutup.*³⁵

³⁴ Francis Fukuyama, *Trust Kebajikan Sosial*, hlm. 38

³⁵ Wawancara dengan Pak Bambang, Kepala Urusan Pembangunan Desa Wonokerto pada tanggal 23 Mei 2017

Selain peraturan soal pemeliharaan ayam, kebiasaan buang air besar sembarangan juga dilarang. Pak Bambang menambahkan:

padahal wisata itu kan sinerginya harus kuat karena digembosi dalam satu sisi aja sudah mati namane, misalnya di susur sungai pengelola pengennya sungainya selalu bersih, jernih terus, bebas dari sampah, tetapi kawasan penduduknya jarang dipikirkan, kalau air jelas dari atas ke bawah, sampah itu kan biasanya dibuang dipinggir-pinggir jalan, siapa yang mau mengawasi 24 jam, ini kan menjadi kendala-kenadala teknis, kalau kita sosialisasi terus misalnya, kita ada program BABS – Buang air besar sembarangan kan dilarang dan di stop BABS itu .³⁶

Untuk menanggulangi buang air besar sembarangan itulah diperlukan dibangunnya toilet untuk umum. Mengingat banyak masyarakat yang tidak memiliki WC. Anggaran dana PLPBK jika digunakan untuk membeli tanah tidaklah cukup dan tidak berarti apa-apa. Maka dilakukanlah peminjaman/hibah tanah dari masyarakat untuk dijadikan toilet untuk umum.

kalau wc yang di dalem itu kan di tanah person, tapi kalau di hibahkan selama minimal sepuluh tahun syaratnya kan gitu. Jadi selama sepuluh tahun itu di hibahkan, nanti setelah sepuluh tahun sudah menjadi milik umum, jadi milik pribadinya dia di hibahkan karena kita hibahnya di aturan progrmannya itu selama minim 5 tahun sebenarnya. Seumpama ada gazebo yang didalem itu kan itu kan milik person sebenarnya, tanahnya person tapi di hibahkan minimal 5 tahun tapi kemaren rata-rata di hibahkan selama 10 tahun, jadi selama 10 tahun tidak boleh di utek-utek sudah ada tanda bukti bermaterai.³⁷

Pada umumnya di masyarakat lain yang menerima program PLPBK, hibah peminjaman tanah dilakukan selama 5 tahun. Akan tetapi, terdapat suasana yang berbeda terjadi di Sangurejo, hibah peminjaman tanah dilakukan selama 10

³⁶ Wawancara dengan Pak Bambang, Kepala Urusan Pembangunan Desa Wonokerto pada tanggal 23 Mei 2017

³⁷ Wawancara dengan Mas Aziz, Tim Pendamping/Faskel pada tanggal 10 Mei 2017

tahun. Tidak hanya tanah untuk toilet saja, tetapi juga ruang terbuka hijau. Bahkan ada masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebanyak 1 meter dikali dengan panjangnya jalan sekitar 80 meter. Sebagaimana disampaikan oleh Mbak Yanti:

*Enggih, tidak ada ganti rugi. Karena kan kalo yang Sangurejo kan ada pelebaran sedikit untuk jalan ke dusunnya kalo nggak salah ada yang pelebaran 1 meter, makannya itu nggak ada ganti rugi untuk umum. Dan azaz bersama itu kita buat banner, kita templek kita papar sebelah Embung. Tapi sekarang kalo nggak salah udah nggak ada.*³⁸

Selama waktu perjanjian tersebut, masyarakat harus sepakat untuk tidak merusak atau mengalih fungsikan atau diklaim menjadi milik pribadi. Segala bentuk peraturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga komunitas.

*Enggih, biar masyarakat itu tau kalo mereka itu udah buat aturan bersama. Jangan sampe aturan itu dilanggar.*³⁹

Pemasangan *banner* hanya sebagai pemberitahuan mengenai kesepakatan bersama masyarakat. Adapun aturan yang disepakati bersama antara lain, aturan tata kelola pembangunan hunian, aturan tata kelola dan pemeliharaan sarana prasarana (infrastruktur, sampah, sanitasi), aturan tata kelola fasilitas umum, sanksi-sanksi terhadap aturan yang dilanggar. Dengan kepatuhan pada aturan tersebut maka akan membuat kehidupan teratur dan berkontribusi pada keberhasilan PLPBK. Setidaknya ada sembilan aturan bersama yang dijadikan sebagai norma baru setelah adanya program PLPBk ini. Berikut ialah aturan bersama yang telah disepakati oleh masyarakat kawasan prioritas Padukuhan Sangurejo

³⁸ Wawancara dengan Mbak Yanti, Anggota BKM Wonomulyo pada tanggal 9 Mei 2017

³⁹ Wawancara dengan Mbak Yanti, Anggota BKM Wonomulyo pada tanggal 9 Mei 2017

Tabel 3.4 Aturan Bersama Masyarakat Sangurejo

No	Aturan Bersama	Bunyi Aturan Bersama
1	Peggunaan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang merusak fungsi lindung Embung Kali Aji. 2. Kebun salak tidak boleh dialih fungsikan kecuali untuk fungsi pelayanan publik. 3. Masyarakat harus menerapkan Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam mendirikan bangunan.
2.	Bangunan dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian bangunan harus dengan orientasi bangunan menghadap ke jalan. 2. Setiap rumah menyediakan akses jalan antar rumah minimal satu meter.
3.	Homestay	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua masyarakat segera mempersiapkan rumahnya masing-masing sebagai homestay dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga kebersihan rumah b. Menyiapkan 1-2 kamar tidur. 2. Menyiapkan kamar mandi dan WC.
4.	Fasilitas Umum Penunjang Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat harus memelihara fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). 2. Masyarakat akan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di permukiman sebagai ruang bersosialisasi
5.	Tempat Tujuan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyiapkan kebun salaknya untuk “Wisata Petik Salak” sesuai perencanaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga kebersihan kebun salak b. Menyisihkan ruang untuk jalan di dalam kebun salak, untuk akses jalan bagi pengunjung kebun salak. 2. Masyarakat yang memiliki petak sawah yang telah direncanakan sebagai “Wisata Tanam Padi”, siap bekerjasama dengan pengelola wisata Kawigesang.
6.	Sanitasi Lingkungan	<p>YANG HARUS DILAKUKAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi WC dengan septictank. 2. Menbangun sumur dengan jarak minimal 10 meter dari septictank atau kandang. 3. Anggota PKK dan Karang Taruna siap bekerjasama dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik. <p>YANG HARUS DIHINDARI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuang air kotor langsung ke pekarangan. 2. Kandang menyatu dengan rumah. 3. Membuang sampah sembarangan. 4. Buang air besar sembarangan pada saluran air.

7.	Jalan dan Kelengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat RT 3 merencanakan batas antara jalan dan pekarangan rumah. 2. Masyarakat merelakan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan. 3. Masyarakat menyediakan saluran drainase di sepanjang ruas jalan Padukuhan Sangurejo. 4. Masyarakat melakukan saluran irigasi yang telah rusak dengan konstruksi yang lebih permanen. 5. Masyarakat memelihara saluran yang sudah ada, dengan tidak membuang sampah, limbah WC dan Buang Air Besar Sembarangan di saluran irigasi atau drainase. 6. Masyarakat secara swadaya menyediakan pohon di sepanjang tepi jalan (agar teduh dan indah). 7. Masyarakat memelihara pohon yang sudah ada. 8. Masyarakat secara swadaya menyediakan penerangan jalan bagi ruas jalan yang gelap. 9. Masyarakat memelihara lampu penerangan yang sudah ada.
8.	Mitigasi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana erupsi Merapi. 2. Perlu dibentuk Forum Siaga Bencana Berbasis Masyarakat
9.	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pariwisata dilakukan oleh masyarakat Padukuhan Sangurejo. 2. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan memadukan berbagai potensi wisata yang ada di Padukuhan Sangurejo dan sekitarnya. 3. Anggota PKK setiap RT siap untuk mulai belajar dan memproduksi olahan salak, ayam dan ikan. 4. Karang Taruna setiap RT siap membantu pemasaran produk yang dihasilkan. 5. Masyarakat merencanakan kandang kelompok diluar permukiman 6. Masyarakat siap mengelola kotoran ternak untuk diolah menjadi pupuk organik. 7. Masyarakat bersedia memanfaatkan pekarangan secara produktif seperti menanam sayuran, tanaman herbal atau untuk kolam ikan.

C. Pemberdayaan Komunitas Dalam Pelaksanaan PLPBK

Sebelum datangnya program PLPBK, permukiman masyarakat Sangurejo memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jarak antar rumah yang sempit yaitu sebagian besar berjarak kurang dari 5 meter. Bangunan juga tidak serasi satu sama lain, sehingga tata letak bangunan tidak tertata dengan baik. Kondisi ini tentu menjadikan permukiman di Padukuhan Sangurejo padat dan tampak tidak beraturan. Kawasan permukiman juga tidak didukung oleh Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup dan jaringan jalan yang memadai akibat keterbatasan lahan dan letak bangunan yang tidak tertata.

Selain itu sebanyak 48 rumah di Padukuhan Sangurejo tidak melengkapi WC nya dengan *septic tank* sehingga saluran dari WC dibuang ke sungai dan ke saluran air yang membentang disekitar permukiman; masih terdapat 23 rumah yang tidak mempunyai WC; terdapat 30 kandang yang menyatu/berdekatan dengan rumah; serta banyak sumber air bersih yang letaknya berdekatan dengan *septic tank* maupun kandang (berjarak kurang dari 10 meter).

Limbah rumah tangga secara umum masih dibuang ke belakang pekarangan rumah tanpa dilengkapi dengan saluran buangan. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar rumah menjadi becek, kotor, dan tentu dapat menjadi sumber berkembangnya bibit penyakit. Pengelolaan sampah pun belum dilakukan dengan baik, sehingga masih banyak ditemukan timbunan sampah di permukiman. Kepadatan dan kekumuhan di Padukuhan Sangurejo juga diperparah dengan jumlah KK Miskin kedua di Desa Wonokerto setelah Tunggul Arum yakni sebanyak 81 KK Miskin

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan di kawasan prioritas khususnya di Padukuhan Sangurejo, diperlukan strategi khusus untuk menjadikan manusia dan masyarakat sebagai modal utama pembangunan, dengan kata lain muncul paradigma yang menekankan manusia dan masyarakat sebagai modal sosial.⁴⁰ salah satunya pemberdayaan merupakan metode alternatif pembangunan ini.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok komunitas). Apabila kelompok komunitas sudah memiliki kepercayaan (*trust*), memiliki jaringan (*networking*) dan patuh norma (*norm*)) maka akan tercipta modal sosial yang kuat. Dengan modal sosial yang kuat maka kita akan dengan mudah mentransfer pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada masyarakat dan mengarahkannya. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan, kemampuan, dan keterampilan melalui penguatan modal sosial kelompok komunitas untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Paradigma pemberdayaan berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan dengan memberikan kekuasaan terhadap kelompok miskin untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka rencanakan sendiri, termasuk mengelola dana sendiri baik dari pemerintah maupun pihak lain. Inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dan

⁴⁰ Ambar T. Sulistayani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), hlm. 70.

pemberdayaan masyarakat. Melalui metode ini masyarakat diberikan hak dan kesempatan dalam mengelola sumberdaya dalam pembangunan. Karena pentingnya pemberdayaan, pemerintah Desa Wonokerto memberanikan diri dengan memberikan anggaran peningkatan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan melebihi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Sebagaimana disampaikan Pak Bambang:

Kemudian dari peningkatan sumberdaya manusianya, Wonokerto itu hampir 60% itu pemberdayaan baru yang 40% itu insfrastuktur. Nah insfrastuktur saja kita dekatkan dengan objek-objek wisata harus kita bangun karena kita memberanikan diri dengan porsentasi 60:40, 60 harus pemberdayaan, pelatihan-pelatihan itu misalnya kabupaten pelatihan dasar, seng nganu SKBB-SKBB kabupaten opo propinsi, kemudian anggaran kita tindak lanjut teknisnya.⁴¹

Kondisi padat, kumuh dan miskin di kawasan prioritas merupakan masalah sosial dan juga kondisi yang juga tidak diharapkan oleh masyarakat sehingga mendorong bagi masyarakat agar muncul usaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan yakni, perubahan menuju kondisi yang lebih diharapkan atau menuju kondisi ideal. Dari kondisi miskin menuju kondisi sejahtera. Salah satu metode proses perubahan masyarakat ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Adapun pelaksanaan pemberdayaan dalam program PLPBK di Sangurejo adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran

Menurut Sulistiyani, pada tahap penyadaran komunitas yang hendak diberdayakan harus dipersiapkan terlebih dahulu atau prakondisi. Agar

⁴¹ Wawancara dengan Pak Bambang, Kepala Urusan Pembangunan Desa Wonokerto pada tanggal 23 Mei 2017

pelaksanaan pemberdayaan berjalan dengan efektif. Penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi yang dialaminya, dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan tahap penyadaran ini salah satu contohnya ialah melakukan kegiatan studi banding di desa yang telah berhasil dengan program PLPBK. Sebagaimana disampaikan Mbak Yanti:

*Iya, itukan kita studi banding kesana, kalo mereka kan untuk juga infrastruktur dusunnya maka ada pembuatan kandang sapi yang membuat gazebo-gazebo itu juga, makane kita studi banding disana itu untuk penggalian inspirasi lah. jadi kita biar punya gambaran, makane kita studi banding di Kulon Progo.*⁴²

Dengan diadakannya studi banding ke Kulon Progo, akan memberikan wawasan serta pengetahuan bahwa perubahan dapat dilakukan jika masyarakat tersebut mau dan bertekad merubahnya. Selain itu, tahap penyadaran perubahan perilaku dilakukan dengan forum-forum yang diadakan oleh masyarakat sendiri.

Sebagaimana disampaikan oleh Mas Andi:

*saat menyebut potensi dan menyebut prilaku dengan forum-forum kita rumuskan bersama-sama. Kita punya potensi ini tetapi prilaku kita masih ada yang kurang. Dalam konteks ini adalah pakumis, salah satu kekumuhan waktu itu kan belum tertibnya BAB, buang sampah dan lainnya. makanya dari kenapa si masyarakat melakukan perilaku itu, ternyata ini kebiasaan dari dulu dan belum ada edukasi untuk merubah prilaku waktu itu. Saat ditanya pentingnya forum ini apa, ya untuk merubah prilaku-prilaku, trus pentingnya forum ini untuk apa, ya untuk menyiapkan masyarakat supaya siap membangun apa yang di inginkan masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat sendiri untuk membentuk sebuah kawasan yang produktif dengan diwujudkan melalui kepariwisataan, rumah-rumah bisa digunakan sebagai pendukung pariwisata.*⁴³

⁴² Wawancara dengan Mbak Yanti, Anggota BKM Wonomulyo pada tanggal 9 Mei 2017

⁴³ Wawancara dengan Mas Andi, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 11 Mei 2017

Dengan semangat tersebut diharapkan dapat menghantarkan masyarakat sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki keadaan. Hal itui dibuktikan pada obyek studi banding di Kulon Progo yang telah nyata berubah. Dengan begitu masyarakat akan menyadari bahwa perubahan dapat dilakukan siapa saja termasuk masyarakat Sangurejo. Selain itu, studi banding juga dapat menjadi bahan penggalan inspirasi untuk dijadikan referensi pada pelaksanaan Program PLPBK. Akhirnya tumbuh dalam pikiran masyarakat untuk mau belajar.

Tabel 3.5 Tahap Penyadaran Dalam PLPBK

Tahapan	Bentuk Kegiatan
Penyadaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya 2. Sosialisasi Massal 3. Refleksi Perkara Kritis 4. Penggalan Visi dan Misi 5. Studi Banding

2. Tahap Transformasi

Merupakan transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif ketika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.⁴⁴ Proses belajar tentang pengetahuan, kecakapan dan

⁴⁴ Ambar T. Sulistayani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, hlm 83

keterampilan salah satu contohnya ialah ketika pembangunan pendopo pada kompleks wisata embung Kali Aji. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Aziz:

di survey, trus kita kan sebagai pendamping sebenarnya kita tidak melakukan tapi kita punya semacam aturan, kita ajarkan ke masyarakat seperti ini lo prosesnya, jadi masyarakat mengerjakan sedikit melenceng kita benerkan kalau ngak tahu mereka nanya kalau gampangnnya njejeri lah. “oh mas kalau ini mau di buat kuda-kudane besi mau di buat seperti apa pak? Mau di cor? Pakau kayu/ atau besi? Kalau kayu nanti lama, paling murah besi. Kalau besi kita ngak bisa mas! Kalau ngak bisa survey mana yang bisa, ada yang disuruh survey. Udah dapet? Udah, suruh kesini presentasi dia, ukuran segitu nanti dibuat gini-gini yang paling cocok warga yang mana? Yang ini” gitu. Jadi mereka sendiri yang nilai. Jadi kita datengkan, seperti gampangnnya kita gentenglah. Genteng juga gitu, ada yang kita utus untuk survey, genteng Godean, genteng mana-mana-mana, harga berapa, sampelnya dibawa, nah mana yang paling cocok? Oh yang paling cocok ini, ya cari genteng yang kayak gini yang paling murah dimana. Mereka juga yang nyari. Ya itu sebenarnya kita tidak menggurui tapi mengajari masyarakat setempat seandainya nanti dapat dana lagi itu mereka sudah bisa mas tanpa kita dampingi, tanpa TAPP, tanpa nganu, seperti pemasaran juga itu. Kebetulan kemaren juga sudah ketemu mas Andi, mas Andi juga sudah lost, dia sudah fasih di pemasaran, tapi mungkin juga seharusnya ada selain mas andi.⁴⁵

Sebagaimana penjelasan di tahap penyadaran, masyarakat telah terkondisi kemudian belajar salah satu pengelolaan pembangunan. Dengan pembelajaran tersebut, masyarakat secara tidak langsung telah *ditransfer* pengetahuan dan keterampilan oleh pendamping sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Sehingga masyarakat dapat mengambil pembelajaran tentang tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas. Kemudian, masyarakat Sangurejo diharapkan sudah lebih mandiri dan mampu untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri,

⁴⁵ Wawancara dengan Mas Aziz, Tim Pendamping/Faskel pada tanggal 10 Mei 2017

dan jika ke depan masyarakat Sangurejo kembali mendapatkan dana pembangunan, masyarakat Sangurejo diharapkan sudah lebih siap berpartisipasi secara maksimal untuk memajukan desa secara bersama-sama.

Tabel 3.6 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Lokal

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Deskripsi Singkat
1.	Pelatihan Pemasaran Sosial dan Pelatihan Perumusan Visi dan Misi Marketabel	Jumat, 4 April 2014	Kegiatan ini bertujuan untuk membekali masyarakat Sangurejo agar dapat menyusun dan menyepakati visi dan misi pembangunan
2.	Sosialisasi Pemasaran Sosial dan Teknik Pemasaran	18 dan 24 Juni 2014	Kegiatan ini bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam TIPP
3.	Perumusan dan Penyepakatan Dokumen Strategi Pemasaran (Basis dan Desa)	Pelaksanaan secara maraton bulan Juli, Agustus, September dan Oktober	Kegiatan ini adalah sosialisasi Dokumen Strategi Pemasaran yang merespon hasil Pemetaan Swadaya, bertujuan advokasi, edukasi dan kemitraan kedepannya.
4.	Pelatihan “SADAR WISATA”	Sabtu, 13 September 2015	Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama KKN STIPRAM dan delegasi Dinas Pariwisata Kab. Sleman
5.	Pelatihan Pengelolaan Homestay	Rabu, 17 September 2015	Kegiatan ini diampu oleh mahasiswa KKN STIEPRAM dan Delegasi LPP Hotel Konvention
6.	Pelatihan Pembuatan Makanan Berbahan	16 September 2015	Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama KKN STIPRAM dan

	Dasar Ikan		delegasi Dinas Pariwisata Kab. Sleman
7.	Pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan Dasar “Produk Lokal”	September 2015	Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama KKN STIPRAM dan delegasi Dinas Pariwisata Kab. Sleman
8.	Pengenalan Marketing Tools, Proposal dan Media Offline	Sabtu 25 Oktober 2015	Kegiatan ini diampu oleh TAPP
9.	Tips dan Triks Desain	Sabtu 25 Oktober 2015	Diampu oleh narasumber ahli desain Adi Rosadi, SIP.
10.	Pelatihan Pembuatan Proposal Marketabel	Sabtu 25 Oktober 2015	Kegiatan ini diampu oleh TAPP
11.	Pelatihan Pengelolaan Marketing Tools Online	Selama bulan November 2015	Diampu oleh narasumber ahli website Ibnu Bur Huda Spd.T
12.	Penyusunan Konten Marketing Tools (Katalog produk, brosur, leaflet).	30 November 2015	Diampu oleh narasumber ahli website Ibnu Bur Huda S.pd.T
13.	Pelatihan “Packaging” Produk dan perumusan Brand Ambassador	Desember 2015	Kegiatan ini diampu oleh TAPP kemudian terumuskanlah KAWIGESANG dan beberapa tradisi yang akan menjadi duta wisata Sangurejo
14.	Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kamis, 13 November 2014	Kegiatan ini diampu oleh Narasumber ahli SBTM Bapak Michel dari Puskesmas Turi
15.	Pelatihan Pengolahan Sampah	Minggu, 30 November 2014	Kegiatan ini diampu oleh narasumber ahli dan penggiat pengolahan Sampah

			Handayani
16.	Review Prosedur Tetap (Protap) Tanggap Darurat	5 Desember 2014	Kegiatan ini diampu oleh narasumber ahli mitigasi bencana Bapak Sunarjo.

(Sumber : Dokumen Laporan Pemasaran Sosial PLPBK 2014)

Program PLPBK merupakan suatu proses dan suatu hasil. Dikatakan sebagai proses ialah pembelajaran masyarakat itu sendiri dalam mengelola program. Harapannya ialah ketika masyarakat telah memiliki wawasan, pengetahuan dan ketrampilan yang cukup melalui pembelajaran program ini, maka masyarakat dengan mandiri dapat mengelola program lainnya. Dikatakan sebagai hasil maksudnya ialah, ketika program ini telah selesai sesuai perencanaan, maka pasti ada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Tahap Peningkatan Kemampuan

Merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan kemampuan masyarakat melakukan inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya.⁴⁶ Apabila masyarakat telah mencapai tahap ini, maka masyarakat telah mampu mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

⁴⁶ Ambar T. Sulistayani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, hlm. 83

Berdasarkan penjelasan tersebut masyarakat dikatakan mampu jika ditandai dengan inisiatif, kreasi, dan inovasi dalam lingkungannya. Pada kenyataannya masyarakat Sangurejo yang dulu padat kumuh miskin, kini telah berubah menjadi lebih baik. Seperti infrastruktur yang baik, tersedianya fasilitas umum, lapak untuk penjualan, dan pola hidup bersih. Dengan adanya modal tersebut, kini masyarakat Sangurejo telah berinovasi menjadikan kampungnya sebagai kampung Wisata Gerbang Sangurejo (kawigesang). Sebagaimana disampaikan Pak Sehad:

Kalo sini berhasil. Alhamdulillah dari modal PLPBK, kita kembangkan rekan-rekan karangtaruna semangat untuk membuat kampung wisata, dari modal seperti itu loh mas seperti itu. Dari dulu kawasan kumuh, miskin, padat penduduk, sekarang ditangani PLPBK sekarang sudah perkembangan menuju sempurna. Nah respon masyarakat kan, “lah iki payu didol pak, dibuat aja.” Maksud payu didol buat wisata kan mendatangkan uang kesitu ada uang masuk. Sekarang kali sudah dibersihkan oleh warga masyarakat. Kan disana ada alur, ada kali juga disitu. Kemarin kerjasama dengan BLH bersama teman-teman di komunitas Payung Hijau, kita digerakan masyarakat sepedukuhan membersihkan pokoknya yang penting nggak konsumsi sampah dulu. Sampah-sampah aja dikumpulkan, diambil, terus dibawa ke TPA wonosari gitu. Itu justru disitu diberi honor juga dari BLH yang mengerjakan itu. Jadi kemarin ya Alhamdulillah, terus ini dari pancingan itu nah masuk akal didukung oleh komunitas Payung Hijau pertama kali, mari kita lestarikan kali kita, kita jaga kali kita. Kalo sudah bersih, nggo ngopo meneh? Yaudah kita jual aja.⁴⁷

Diera sekarang ini trend wisata lebih banyak yang menyukai wisata kembali ke alam seperti menyusuri sungai, berpetualang di kebun atau hutan, bertani dan berkebun. Kesempatan ini dimanfaatkan masyarakat Sanggurejo

⁴⁷ Wawancara dengan Pak Sehad, Dukuh Sangurejo pada tanggal 23 Mei 2017

dengan mengkonsep kampungnya sebagai desa wisata. Pernyataan diatas membuktikan bahwa kini dengan adanya hasil pembangunan PLPBK, masyarakat mulai mengembangkan inovasi dan kreativitas dengan membidik berbagai potensi yang dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 3.7 Tahap Peningkatan Kemampuan Dalam PLPBK

Tahapan	Bentuk Kegiatan
Peningkatan Kemampuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin mitra dengan berbagai pihak. 2. Melaksanakan pemasaran komersial (<i>fundrising</i>). 3. Melaksanakan pemasaran sosial. 4. Membuat konsep pengembangan kawasan prioritas menjadi kampung wisata.

Pemberdayaan bukanlah proses yang abadi. Pada titik tertentu masyarakat telah mencapai suatu titik berdaya dapat dilepas untuk dapat melakukan kemandirian. Menurut Sulistiyani, tahapan tersebut dapat dinilai dengan perubahan KAP (*knowledge, attitude, practice*) melalui pendekatan aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif (AKPK)⁴⁸ sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.8 Indikator Keberdayaan Masyarakat Sangurejo

Tahapan Afektif	Tahapan Kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
Belum merasa sadar & peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun

⁴⁸ Ibid, hlm. 84

Tumbuh rasa kesadaran & kepedulian dengan antusias me	Menguasai pengetahuan dasar tentang program pembangunan PLPBK	Menguasai keterampilan dasar seperti melaksanakan proyek pembangunan	Bersedia terlibat dalam pembangunan seperti turut hadir disetiap rapat, pertemuan, rembuk warga dll
Memupuk rasa kesadaran & kepedulian seperti saling mendukung untuk terlibat dalam program PLPBK	Mengembangkan pengetahuan dasar seperti terlibat dalam pemetaan swadaya	Mengembangkan keterampilan dasar seperti belajar melakukan lelang sederhana	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan seperti terlibat dalam KSM, relawan, dsb
Merasa membutuhkan kemandirian dengan aktif mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas diri.	Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi seperti mampu dalam menyusun RPLP dan RTPLP	Memperkaya variasi keterampilan seperti pemasaran, menjalin mitra kerjasama, dsb.	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan seperti membentuk organisasi pengelola kampung wisata.

Hasil pemberdayaan pada program PLPBK di kawasan prioritas Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dapat dilihat dari penjelasan para pelaksana program, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Erwantini

Secara hasil fisiknya ya saya puas mas, keterlibatan penduduknya mereka juga senang kok, ibu-ibu nya punya motivasi. Alhamdulillah program-programnya banyak yang nyantol, bank sampah nyantol, KWT nya juga nyantol, untuk taman sayurnya juga.

Banyak program-program seperti pengelolaan sampah, tanaman pekarangan produktif. Hal yang paling penting ialah keterlibatan warga serta

motivasi penduduk yang memiliki cita-cita pada perubahan di lingkungan masyarakat. keberhasilan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya program PLPBK. Berikut ialah perubahan pada masyarakat Sangurejo sebelum dan sesudah pemberdayaan pada program PLPBK.

Tabel 3.9 Perubahan Masyarakat Sangurejo Setelah Pemberdayaan

Sektor	Sebelum	Sesudah
Lingkungan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat masih buang air besar sembarangan di sungai • Limbah rumah tangga dibuang di sungai • Sampah ditimbun di sekitar rumah • Mencuci pakaian di sungai • Kandang menyatu dengan permukiman dan sumber air bersih • 23 rumah tidak memiliki toilet • 48 rumah tidak melengkapi dengan <i>septic tank</i> • Tanah pekarangan dibiarkan kosong • Tidak memiliki ruang terbuka hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan MCK bagi masyarakat yang tidak memiliki WC dilakukan di toilet umum • Limbah rumah tangga dibuang dengan sistem sanitasi dan drainase tidak lagi di buang ke sungai • Sampah ditimbun di tempat yang jauh dari permukiman • Rumah yang tidak memiliki <i>septic tank</i> membuat <i>septic tank</i> kelompok • Tanah pekarangan yang kosong ditanami tanaman produktif dan dibuat kolam ikan • Dibangun 4 gazebo sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Bercocok tanam sebagai mata pencaharian • Belum mampu mengolah salak • Salak dijual dalam bentuk buah 	<ul style="list-style-type: none"> • Petik salak dan menanam padi sebagai destinasi wisata • Salak dibuat menjadi kripik atau manisan • Salak yang dijual dalam bentuk buah dibuat keranjang agar menambah nilai jual.
Peternakan	Kandang menyatu dengan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Kandang berjarak minimal 10 meter dari permukiman

		<p>dan sumber air bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotoran ternak diolah menjadi pupuk kompos dengan konsep kandang kelompok yang jauh dari permukiman dan sumber air bersih.
Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Embung Kaliaji yang fungsinya sebagai waduk penampung air untuk keperluan irigasi • Sungai digunakan MCK 	<ul style="list-style-type: none"> • Embung dibangun fasilitas wisata seperti pendopo, toilet, <i>foodcourt</i>, gazebo, taman baca, spot foto, spot panahan dsb kini menjadi komplek wisata terpadu kawigesang • Dibentuk organisasi pengelola komplek wisata tersebut • Sungai dijadikan destinasi wisata tracking
Seni Budaya	Jathilan, hadroh, pencak silat, kubro siswo yang awalnya hanya ditampilkan ketika ada event atau undangan	Ditampilkan di panggung komplek wisata kawigesang secara rutin untuk menarik para pengunjung.

Selain program yang bersifat peningkatan kapasitas masyarakat, juga kemampuan masyarakat dalam membuat inovasi setelah program pemberdayaan, sebagaimana disampaikan Pak Sehadhi :

*Karena siki anu mas, kebanyakan do seneng njebur kali kan ada kali, tracking sungai, terus jalan-jalan turut kebon turut alas niku. Nanti kidul Sangurejo kan daerah sawah, itu mau kita kembangkan untuk pertanian pagi sehingga wisatawan itu penginnya juga pengin melu tandur, melu matun, melu ngluklu intine seperti itu. Trus yang di dalem le njenengan mbangun itu kan wis ono sing arep nginep kan wangun. Dalane wis apik, penerangan udah ada, wc udah ada, gazebo nek ngisis neng ngrepan wis ono. Sekarang memang udah, kie monggoh kreativitas lokal ki pie, loh wis ono modal koyo ngono.*⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Sehadhi, Dukuh Sangurejo pada tanggal 23 Mei 2017

Penjelasan Pak Sehadi telah menunjukkan hasil pembangunan secara fisik atau infrastruktur dari program PLPBK seperti adanya akses jalan, penerangan, gazebo, WC dan sebagainya. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut ditunjang dengan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan sadar wisata, sehingga masyarakat memiliki kreatifitas dan inovasi untuk mengembangkan destinasi wisata tracking sungai, wisata edukasi pertanian, dan sebagainya. Berikut adalah hasil pemberdayaan sebelum dan sesudah pada masyarakat Sangurejo secara kuantitatif

Tabel 3.10 Perubahan Padukuhan Sangurejo Secara Kuantitatif Setelah Pemberdayaan

Sektor	Sebelum	Sesudah
Infrastruktur	Jalan masih tanah Selokan/ parit belum dibangun Tidak memiliki drainase dan sanitasi Tidak memiliki penerangan jalan	Memiliki drainase dan sanitasi Selokan/parit Talud 800 meter jalan paving 15 tiang lampu penerangan
Pariwisata	Embung Kaliaji yang hanya berfungsi sebagai penampung air untuk irigasi pertanian	1 Pendopo 1 Panggung 2 Spot foto 1 Kompleks panahan/jemparingan 1 Rute tracking sungai 1 Denah wisata 3 Kebun wisata petik salak 30 Homestay 1 Organisasi Pengelola Kawigesang
Lingkungan Permukiman	Fasilitas permukiman sangat minim.	4 Gazebo Ruang Terbuka Hijau Tanaman pekarangan produktif 20 tempat sampah 6 Toilet Umum (2 khusus difabel dan lansia) 4 papan informasi

		1 Taman Bacaan Masyarakat
Perikanan	Belum ada kolam	2 kolam ikan
Peternakan	30 kandang masih menyatu dengan permukiman	6 Kandang Kelompok berjarak lebih dari 10 meter dari permukiman beserta pengelolaan pupuk kompos
Seni Budaya	Belum memiliki sanggar	1 sanggar pencak silat, jathilan, kubro siswo dan hadroh
Industri Rumah Tangga	Salak hanya dijual dalam bentuk buah kepada pengepul	1 industri pembuatan keranjang salak 1 industri kripik salak 5 lapak pedagang/ <i>foodcourt</i> 1 cafe

Setelah proses pemberdayaan dilaksanakan pada masyarakat di Sangurejo, kini masyarakat mulai melaksakan pola hidup bersih dan sehat. Tidak buang air besar sembarangan. 23 rumah yang tidak memiliki WC dapat ditunjang dengan dibangunnya toilet umum. Limbah rumah tangga tidak dibuang langsung ke sungai atau disekitar permukiman. Bahkan kini memiliki sanitasi dan drainase yang baik. Sampah yang biasanya ditimbun, sekarang mulai ditampung di tempat sampah. Akses jalan juga sangat baik. Fasilitas-fasilitas permukiman dapat dimanfaatkan khususnya masyarakat miskin. Pekarangan yang kosong, ditanami tanaman produktif dan kolam ikan. Masyarakat mulai mampu mengembangkan hasil pertanian menjadi produk olahan. Pertanian tidak menjadi mata pencaharian utama, kini mulai mengembangkan pariwisata. Kawasan permukiman telah tertata dengan rapi, bersih, nyaman dan asri. Sangurejo yang dulunya menjadi kampung pakumis (padat, kumuh, miskin) kini telah berubah. Bahkan sebanyak 30 rumah di Sangurejo dijadikan *homestay*, tentunya dapat menambah pemasukan bagi masyarakat.

Ketika masyarakat telah mencapai kemandirian dalam mengatasi permasalahannya, upaya yang dilakukan tidak kalah penting adalah perlindungan. Inilah saat yang ditunggu, yaitu kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah lokal. Dan terbukti ketika masyarakat Sangurejo telah selesai dengan pembangunan dan berupaya untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan perekonomian dan pariwisata, kemudian hadir minimarket-minimarket tidak jauh dari lokasi kawasan prioritas. Upaya yang dilakukan pemerintah lokal untuk melindungi masyarakat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang:

kemaren kan kulon kecamatan kan ada indomart langsung kita gasak kabeh. Semua bakul-bakul sek ono neng kono kita kumpulkan, masyarakat kita mufakati bareng karena kalau tidak itu kita hancur kok. Pedagang-pedagang kita itu hancur. Neg harga kita memang lebih murah, bisa kita membuat harga lebih murah tetapi image nya iku wes ora iso kita itu, blonjo nang indomart kan seko cah cilik tekan mbah-mbah ngerti jajan nang indomart alfamart. Ming koyo masyarakat kon mbangun image iku ra mungkin iso, intine awak dewe mung duwe kekuatan gotong royong ini yang bisa melibas kapital-kaptal itu.⁵⁰

Letak Sangurejo yang strategis membuat perusahaan minimarket kelas nasional membangun minimarketnya di sekitaran Sangurejo. Hal ini jika dibiarkan akan membunuh pertokoan dan lapak pedagang lokal. Melihat situasi ini, pemerintah desa dengan masyarakat untuk bermusyawarah, bahwa kehadiran minimarket tersebut membawa dampak negatif bagi perekonomian warga sekitar. Untuk itu berdasar mufakat pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk menolak kehadiran minimarket tersebut. Hal itu dilakukan dengan gotong royong dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Bambang, Kepala Urusan Pembangunan Desa Wonokerto pada tanggal 23 Mei 2017

D. Peningkatan Kesejahteraan Setelah Program PLPBK

Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan, dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan baik lingkungan fisik maupun sosial.⁵¹ Menurut James Midgley dalam Isbandi (2013) kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan.

1. Permasalahan Sosial Dapat Diatasi

Permasalahan utama hingga akhirnya Padukuhan Sangurejo mendapatkan program PLPBK adalah karena Padukuhan Sangurejo tergolong Pakumis (padat, kumuh, miskin) dan menjadi kawasan prioritas di Desa Wonokerto. Permasalahan tersebut melalui program PLPBK dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur secara mendasar seperti toilet umum, jalan, penerangan, irigasi, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya untuk personal, tetapi dapat dimanfaatkan secara umum. Permukiman juga telah ditata menjadi lingkungan yang rapi, bersih dan nyaman. Serta didukung oleh pola hidup sehat masyarakat serta berbagai pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan sehingga mampu untuk mengembangkan diri.

Selain itu juga disusun aturan pembangunan fisik di lingkungan serta rencana pembangunan (RTPLP) sehingga lingkungan permukiman dapat tertata kedepannya. Kemiskinan dapat dikurangi dengan membuka akses terhadap faktor

⁵¹Ambar T. Sulistayani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, hlm. 19.

produksi salah satunya dengan menjadikan Padukuhan Sangurejo kampung wisata sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat diberbagai sektor. Program PLPBK telah terbukti mengatasi permasalahan yang ada di padukuhan Sangurejo.

Gambar 3.11 Kawasan Permukiman Sehat, Nyaman dan Tertata



(Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017)

2. Kesempatan Sosial Dapat Dimaksimalkan

Hasil dari program PLPBK yakni terbentuknya desa wisata membuka kesempatan dan peluang bagi masyarakat Sangurejo untuk meningkatkan pendapatan perekonomian melalui konsep Kampung Wisata Gerbang Sangurejo. Sebagaimana disampaikan Pak Bambang:

Tahun ini kita genjot terus pembangunan desa wisata. Targetnya 2018 itu kita kerjanya dengan wisata desa artinya dengan kita Output akhirnya wisata adalah kita dekatkan hasil bumi masyarakat dengan konsumen pada prinsipnya itu, karena kan sebaik apapun hasil pertanian kita kita masih tidak berdaya dengan pasar, kita masih bergantung dengan pengepul, dengan tengkulak. Paling ndak kan kalau orang banyak yang datang hasil pertanian kan kita dekatkan masing-masing titik kita bangun oleh-oleh khas lah, ciri khas, pasar-pasar desanya kita bangun di masing-masing titik.⁵²

Dengan adanya tempat-tempat wisata di Desa Wonokerto selain membuka peluang usaha dan peluang pekerjaan juga dapat mendekatkan petani dengan konsumen. Sehingga para petani tidak bergantung pada pengepul atau tengkulak. Mengingat mayoritas penduduk Sangurejo sebagai petani khususnya petani salak. Dengan adanya tempat wisata sehingga petani dan konsumen dapat bertransaksi langsung akhirnya pendapatan yang diperoleh para petani dapat maksimal sehingga petani menjadi sejahtera.

3. Kebutuhan Manusia Terpenuhi

Secara material masyarakat Sangurejo telah memiliki fasilitas-fasilitas yang layak untuk kelangsungan hidup. Lingkungan permukiman telah tertata, sehat dan nyaman. Selain pembangunan kualitas permukiman, program PLPBK juga membangun infrastruktur yang menunjang komplek wisata Sangurejo seperti

⁵² Wawancara dengan Pak Bambang, Kepala Urusan Pembangunan Desa Wonokerto pada tanggal 23 Mei 2017

jalan, panggung, *foodcourt*, pendopo, toilet umum, gazebo dan ruang terbuka hijau. Hasil program PLPBK ini telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Sebagaimana disampaikan Pak Purwanto:

Kemudian sampai sekarang yang masih berlaku yang bisa untuk pemasukan dari desa-desa ke masyarakat itu yang embung Kali Aji tadi yang sudah dilakukan pembangunan sudah bagus jadi pariwisata sudah masuk disitu sudah ada sedikit uang yang masuk. Berikutnya ada kuliner-kuliner hasil dari produk-produk masyarakat juga dapat ditampung disitu dan pengunjung yang datang bisa membeli disitu sehingga gunanya adalah untuk menganngkat dari masyarakat miskin yang tidak punya pekerjaan menjadi mempunyai pekerjaan meskipun hanya kecil-kecilan tetapi ada hasilnya gitu.⁵³

Terbentuknya kampung wisata telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sangurejo sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Mulai dari menyediakan kuliner, makanan khas, *homestay*, menjual hasil pertanian dan sebagainya sehingga pendapatan masyarakat menjadi meningkat dan masyarakat mampu dalam memenuhi kebutuhannya.

Tapi kalau homestay meskipun sekarang nilainya masih setengah dari desa lain karena fasilitasnya masih kurang, kalau yang desa lain kan sudah menerapkan tiap kamarnya 50rb, desa lain juga menerapkan kalau perkedatangan itu 10rb kalau tidur lesehan, kalau kita masih 5-7 rb per anak per malem gitu, ya tergantung durasi juga, kadang-kadang kan ada yang masuknya dia transit disini, nginap dan ngak sampai satu malam dan yang lain-lainnya juga yang seperti itu kita hitung 5-7rb, tapi ini kita sudah mulai akan menerapkan tarif 10-15 rb karena sudah masuk tahun ke 2.⁵⁴

Seluruh proses yang panjang telah dilaksanakan. Kini, modal telah dimiliki oleh masyarakat Sangurejo. Tinggal bagaimana upaya masyarakat tersebut untuk terus belajar, mengasah kemampuan, dan keterampilan,

⁵³ Wawancara dengan Pak Purwanto, Kordinator BKM Wonomulyo pada tanggal 2 Mei 2017

⁵⁴ Wawancara dengan Mas Andi, Anggota KSM dan TIPP pada tanggal 11 Mei 2017

meningkatkan kerjasama dan memperluas jaringan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan secara bertahap dan terus menerus.

Gambar 3.10 Hasil Pembangunan Menjadi Kawasan Wisata



(Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tiap-tiap bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian tentang aktualisasi modal sosial dalam pelaksanaan program PLPBK di Padukuhan Sangurejo, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk modal sosial masyarakat Sangurejo meliputi kepercayaan masyarakat, jaringan sosial dan aturan bersama. Kepercayaan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri mempererat kepercayaan antar anggota masyarakat sehingga energi tidak habis untuk berprasangka dan pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Jaringan-jaringan sosial yang terjalin pada masyarakat memperkokoh kerjasama dan mempertahankan eksistensi gotong royong dalam mencapai tujuan, selain itu dapat memperluas jaringan untuk melibatkan pihak eksternal untuk bermitra dalam mencapai tujuan bersama. Aturan-aturan bersama yang disepakati dalam program PLPBK menjadi norma baru dan dapat mendukung keberhasilan program dan menjaga kelestarian lingkungan di Sangurejo dimasa depan.
2. Program PLPBK telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sangurejo yaitu pembangunan infrastruktur mendasar seperti toilet umum, ruang terbuka publik, saluran irigasi, sanitasi, drainase, penerangan

jalan, akses jalan, pekarangan produktif dan sebagainya. Masyarakat yang dulunya miskin dan tidak berdaya dengan berbagai kegiatan pemberdayaan telah mampu secara mandiri dengan mengembangkan kreasi dan inovasi dengan membuka kesempatan bagi masyarakat miskin dengan memanfaatkan kompleks Embung Kaliaji sebagai destinasi wisata sehingga masyarakat miskin dapat mengelolanya dan mendapatkan pemasukan. Termasuk rumah dan kawasan yang bersih, nyaman, rapi ini sudah dijadikan homestay. Kesempatan sosial ini sudah di maksimalkan. Adanya pemasukan ekonomi pada masyarakat membuat kebutuhan manusia dapat tercukupi.

B. Saran

Berdasarkan analisis kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran kepada

1. Pemerintah

Modal sosial tidak hanya bersumber pada ruang lingkup masyarakat sipil saja. Akan tetapi keberpihakan pemerintah dalam mengembangkan modal sosial dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan publik yang condong pada kebijakan sosial, kebijakan tersebut harus pro terhadap keberadaan dan berkembangnya modal sosial.

Modal sosial ibarat dua mata pisau. Di sisi lain modal sosial dapat digunakan sebagai salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Namun disisi lain modal sosial dapat disalahgunakan dalam suatu hal yang buruk. Untuk itu pemerintah harus lebih gencar memberikan program yang melibatkan modal

sosial masyarakat, agar masyarakat tidak menyalahgunakan modal sosial untuk kegiatan yang tidak baik.

Kecenderungan pemerintah sekarang ini menerapkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat, visi dan misi membangun kemandirian masyarakat, hasrat untuk membangun ketahanan sosial, justru malah berakhir dengan semakin runtuhnya modal sosial. Hal ini disebabkan akibat penyimpangan elite politik di Indonesia seperti korupsi yang diekspos media setiap hari kemudian berakibat hancurnya kepercayaan masyarakat. Untuk itu perlu penegakan hukum dan pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah wajib dan harus terus dilakukan.

Bergantinya kepemimpinan nasional rupanya berdampak pula pada pelaksanaan program di level bawah. Seperti yang terjadi pada Program PLPBK. Kini program tersebut berubah menjadi Kotaku (kota tanpa kumuh). Meskipun secara garis besar memiliki kesamaan, namun masyarakat, mitra maupun pihak-pihak lain merasa bingung dengan berbagai program dengan kebijakan yang berbeda pula. Pemerintah harusnya lebih bijak dalam menyaring dan mempertimbangkan berbagai program yang dinilai berhasil dan harus dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan. Bukannya malah mengganti atau bahkan menghapus program tersebut.

2. Desa Pelaksana Program

Melihat kemandirian modal sosial terhadap keberhasilan program PLPBK, diharapkan *stakeholder* yang berada di Desa Wonokerto tetap menjaga modal sosial yang berada di masyarakat. Atau bahkan meningkatkannya. Salah satunya

ialah melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang bersifat untuk kepentingan bersama. Karena modal sosial telah terbukti memberi berbagai manfaat dalam proses pembangunan.

3. Desa-Desa Lainnya

Dalam sejarah pembangunan pedesaan di Indonesia, pada tahun 2013 telah disahkan undang-undang pedesaan. Kemudian secara bertahap dana dengan jumlah yang begitu besar digelontorkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Besar harapan bahwa dengan jumlah anggaran yang besar, serta model pembangunan desentralisasi langsung diturunkan di pedesaan, mampu mengentaskan kemiskinan serta dapat mengatasi permasalahan masing-masing. Hal itu karena, masing-masing desa di berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda serta penyelesaian yang berbeda pula.

Sejauh ini program PLPBK telah banyak memberi manfaat dan memberikan perubahan terhadap komunitas di Padukuhan Sangurejo dan Desa Wonokerto. Seperti efisiensi penggunaan anggaran, bahkan hasil pembangunan dinilai mencapai 2 milyar padahal dana stimulan hanya sebesar 1 milyar. Penggunaan modal sosial juga memperkuat eksistensi sosial seperti gotong royong, altruisme, solidaritas dan resiprositas. Banyak kemajuan dan peningkatan yang telah dirasakan masyarakat. Pemerintah saat ini sedang fokus menyelenggarakan pembangunan berbasis pedesaan memberikan dana yang begitu besar. Untuk itu, momentum ini harus dimanfaatkan setiap *stakeholder* maupun kelompok peduli yang ingin melaksanakan pembangunan berbasis pedesaan secara berkelanjutan dengan memperhatikan modal sosial masyarakat

sebagai salah satu kunci pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa, kelompok-kelompok maupun pihak-pihak yang hendak melaksanakan pembangunan tersebut.

4. Pekerja Sosial atau *Community Worker*

Mengingat pentingnya karena modal sosial mempermudah dalam proses pemberdayaan. Hal ini disebabkan karena kepatuhan masyarakat terhadap norma, memiliki sikap saling percaya, dan memiliki jaringan. Untuk itu mengadopsi modal sosial dalam pemberdayaan sangat diperlukan bagi pekerja sosial baik level mezzo dan makro dalam rangka melakukan perubahan di masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya melihat bentuk-bentuk modal sosial masyarakat yang diaktualisasikan dalam salah satu program pemerintah, sehingga menciptakan perubahan signifikan di masyarakat. Sebetulnya sangat menarik jika dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghancurkan modal sosial masyarakat. Untuk itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukannya agar dapat menyempurnakan keilmuan dan teori modal sosial.

C. Penutup

Data kemiskinan di Indonesia menyebutkan bahwa kemiskinan banyak terjadi di pedesaan. Kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat pedesaan memiliki ciri khas *gemeinschaft*, yakni sebuah komunitas kecil tempat orang dengan latar

belakang dan pengalaman hidup yang sama, hampir semua orang tahu sama lain, serta interaksi sosial yang intim dan akrab seperti dalam kekerabatan.

Dalam komunitas ini terdapat komitmen dan rasa kebersamaan yang begitu besar dan tentunya telah tercipta modal sosial. Apalagi jika ciri *gemeinschaft*, ini berada di komunitas masyarakat miskin yang notabene memiliki rasa senasib dan sepenanggungan.

Kemiskinan dapat dikurangi salah satunya ialah kombinasi keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat miskin, kontribusi masyarakat dan faktor lainnya. Kebijakan pemerintah tersebut salah satunya ialah program PLPBK. Kontribusi masyarakat itu sendiri salah satunya ialah dengan penggunaan modal sosial pada proses pelaksanaan program. Kemanjuran modal sosial mampu mengatasi banyak permasalahan (*multi problem*) karena modal sosial mampu mendorong kesadaran untuk mengatasi permasalahan secara bersama serta mempercepat perubahan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka pikir pembangunan, modal sosial sangat besar manfaatnya untuk menangani berbagai masalah sosial dan pembangunan.

Seperti dalam program PLPBK yang dan menggunakan metode *bottom-up planning* yang menjadikan komunitas miskin sebagai subjek pembangunan dengan mendengarkan aspirasi dan yang dibutuhkan masyarakat level bawah. Dengan begitu masyarakat akan mencapai kemandirian dalam mengatasi segala persoalan. Hal ini merupakan sifat pemberdayaan (*help people to help themselves*), masyarakat menjadi mampu untuk menghadapi kemiskinan. Terjadinya kolaborasi antara program pemerintah dengan masyarakat miskin

dengan modal sosial dan pemberdayaan yang kemudian membawa masyarakat menjadi sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alifitri. 2011. *Community Development : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Basrowi dan Suwandi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Coleman, James S. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. terj. Imam Muttaqien dkk Bandung : Nusa Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. 4 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Field, John. 2016. *Modal Sosial*. terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. terj. Ruslani. Yogyakarta: Qalam.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*. terj. Sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdaya.
- Neuman, Lawrence.2013. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. terj. Edina T. Sofia. Jakarta : Indeks
- Pedoman Teknis Pelaksanaan PLPBK 2014, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- Rustiadi, Ernani dkk. 2009. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat : Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- . 2013. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial di Bidang Kesehatan*. Bandung : Alfabeta.
- . 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- . 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Prespektif Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sulistayani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penangannya*. Malang : Intrans Publishing.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vipriyanti, Nyoman U. 2011. *Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah: Mengkaji Succes Story di Bali*. Malang: UB Press.
- Yin, Robert K. 2008. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Buletin:

Buletin Cipta Karya, Edisi November 2007, No. 11/ Tahun V/2007

Daring:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI,
<http://kotaku.pu.go.id/wartaprint.asp?mid=3570&catid=1&&12/05/2011> diakses pada 30 Maret 2017, pukul 10.18 WIB
 Badan Pusat Statistik, <http://bps.go.id/brs/view/1158/> diakses pada 29 Maret 2017 pukul 08.06 WIB
 Suara Merdeka, <http://berita.suaramerdeka.com/sangurejo-jadi-kampung-wisata/> diakses pada 29 Maret 2017 pukul 11.34 WIB.
 Republika, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8bu-dana-desa-dijamin-rp-1-miliar-per-desa-pada-2016> diakses pada 29 Maret 2017 pukul 11.34 WIB.

Skripsi dan Tesis:

Rukmi, Maharani C. *Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman*, Skripsi, Yogyakarta : Jurusan Manajemen Publik, Fisipol, UGM, 2015.

Puspitasari, Dian Ayu. *Peran Modal Sosial Dalam Produktivitas Gapoktan Di Kabupaten Madiun*, Skripsi, Yogyakarta : Jurusan Manajemen Publik, Fisipol, UGM, 2015.

Jatmiko, Irawan. *Modal sosial dan Pengembangan Institusi Lokal : Penelitian kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP di Desa Semin Kecamatan Semin dan Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*, Tesis, Yogyakarta : Jurusan Sosiologi, Program Pascasarjana Fisipol, UGM, 2004.

LAMPIRAN

krjogja.com

DIY ▾ JATENG ▾ PERISTIWA ▾ PENDIDIKAN ▾ EKONOMI ▾ RAGAM ▾ OLAHRAGA ▾ GAYA HIDUP ▾ WISATA ▾ HIBURAN ▾ ANGKRINGAN ▾ KOLOM ▾

Bisa Berlatih Pencak Silat di Pinggir Kali

Pesona Sangurejo, Belajar Jemparingan di Tepi Telaga

Minggu, 12 November 2017 / 09:10 WIB Editor: Danar Widhiyanto


Share Post

Share on Facebook

Share on Twitter

G+

in



Ilustrasi (Foto Doc)

SLEMAN, KRJOGJA.com - Sensasi salah satu Desa Wisata di wilayah Kabupaten Sleman ini tidak terdapat di tempat lain. Para tamu Desa Wisata ini bisa mendapatkan pengalaman unik yang bisa menjadi kenangan sepanjang masa.

Di Desa Wisata Sangurejo, Wonokerto, Turi, Sleman ini wisatawan bisa menikmati sensasi memanah tradisional gaya Mataraman. Dengan didampingi pemandu yang mendapat pengakuan dari Keraton Yogyakarta, wisatawan yang mencoba permainan ini bisa langsung praktik. Jemparingan di Desa Wisata Kawi Gesang Sangurejo ini ada di bawah 'supervisi' KRT Ali Mustofa dan pelatih Suryadi.

Wisawatan bisa menyewa pakaian tradisional lengkap dengan blangkon atau iket gaya Jogja. Dengan pakaian tradisional gaya Jogja itu, wisatawan kemudian dipandu untuk duduk di atas tikar. Duduk dengan posisi bersila untuk laki-laki dan bersimpuh untuk yang perempuan. Posisi badan menghadap ke Selatan.

"Kalau Gaya Jogja harus menghadap ke Selatan dengan sasaran ada di sebelah Timur. Badan harus tegak karena melambangkan sikap seorang ksatria. Tidak boleh kelihatan loyo," ujar Eko, pemandu Jemparingan Desa Wisata Kawi Gesang Sangurejo sembari memberi contoh posisi yang seharusnya.

Lokasi Jemparingan yang berada di selatan kantor Sekretariat Desa Wisata ini ada di tepi Telaga Desa atau Embung Kali Aji. Ini menambah sensasi alami. Rerimbunan pohon, air telaga yang tampak jernih, embusan angin semilir, membawa masuk ke dalam suasana desa yang nyaman dan tenteram.

Tidak hanya Jemparingan, seni tradisi beladiri pencak silat juga bisa menjadi pilihan bagi tamu. Silat tradisi Satria Tama di desa ini sudah menjadi anggota Paguyuban Pencak Silat Yogyakarta. "Selain menjadi atraksi wisata yang disuguhkan kepada para tamu, pencak silat ini juga bisa diajarkan ke tamu-tamu yang berminat," ujar Ketua Desa Wisata Sangurejo Andi Jayaprana.

Jemparingan dan pencak silat itu, menurut Andi, hanya sebagian dari atraksi seni budaya andalan di Sangurejo. Atraksi seni budaya lainnya adalah Badui, keroncong, Tari Ramayana dan hadroh.

Tamu di Desa Wisata Sangurejo ini kebanyakan komunitas, pelajar, organisasi pemuda dan mahasiswa. Di catatan kas Desa Wisata terlihat komunitas mobil Suzuki pernah datang sebanyak 350 mobil, klub Zebrakarta (90 mobil), SOC Suzuki (50 mobil), dan Daihatsu Charade (50 mobil).

Dari sekolah tercatat SMK Tempel (160 peserta), SMP Muhammadiyah 1 Sleman (200 orang). Lalu Makrab UIN Sunan Kalijaga Jogja (100 org), UNY (300 org), AKRB (150 org), UWMY (120 org), dan sebagainya. Mahasiswa dari UIN dan AKRB menjadi tamu yang berulang di Desa Wisata ini.

CARI BERITA

STAY CONNECTED

f

JADWAL SHOLAT

WAKTU 19:21 ISYA

AGENDA JOGJA

REPUBLIC

Harasumber

Pemeliharaan 09, 10, 11, 13 Januari 2018 Wilayah DIY

09 Jan 2018 - 01:43 WIB

SEMUA AGENDA JOGJA

POPULAR

Activate Windows

Seniman Sujud Kendang Meninggal Dunia

3 jam lalu

Agenda Wisata Bulan Januari 2018

11 jam lalu

Trump Tawarkan Abu Dis sebagai Ibukota Palestina

6 jam lalu

Kantongi Ganja, Buruh Bangunan Dikecek Polisi

7 jam lalu

Gunungkidul 'Diamuk' Angin Kencang, Begini Aksi BPBD

18 jam lalu

SST HARI INI

Activate Windows

Senin, 15 Januari 2018

Follow us on



HarianJogja.com

kata kunci...



Home Bantul Gunung Kidul Kota Jogja Kulon Progo Sleman

INFORIAL

WISATA SLEMAN

Outbond Ala Pendekar di Kampung Wisata Kawi Gesang, Tertarik?



Ilustrasi (Dok./JIBI/Harian Jogja)

Selesa, 22 Maret 2016 20:55 WIB | Abdul Hamied Razak/JIBI/Harian Jogja |



Wisata Sleman bertambah destinasi dengan pembukaan Kampung Wisata Gerbang Sangurejo (Kawi Gesang) yang berada di Dusun Sangurejo, Wonokerto, Turi.

Harianjogja.com, SLEMAN- Keberadaan desa wisata terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menarik wisatawan. Salah satu lokasi wisata baru yang kini ditawarkan adalah Kampung Wisata Gerbang Sangurejo (Kawi Gesang) yang berada di Dusun Sangurejo, Wonokerto, Turi.

Ketua Kampung Wisata Kawi Gesang Andi Jayaprana mengatakan, desa wisata tersebut berdiri untuk mengangkat potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Dia meyakini, Kawi Gesang akan menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan.

Dia menyontohkan, daya tarik yang ditawarkan berupa silat tradisi Mataram, Jemparingan atau olahraga panahan tradisional Mataram.

"Ada juga kesenian Badui serta pagelaran kesenian lainnya yang rencananya akan kami gelar secara rutin. Kami berharap semua yang kami sajikan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung," ungkap Andi, Senin (21/3/2016).

Andi menambahkan, selain kesenian dan budaya, Desa Wisata Kawi Gesang juga menyediakan wisata alam seperti embung, trek Kali Aji, dan outbond ala "Pendekar".

Mengapa iklan ini? ⓘ

Padukuhan Sangurejo sendiri memiliki luas 38,41 hektare. Dusun ini menjadi kawasan prioritas terpilih Desa Wonokerto. Berdasarkan program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLBK), Sangurejo masuk dalam kategori pemukiman padat, kumuh, dan miskin.

Namun berkat adanya program PLBK tersebut Sangurejo menjadi salah satu dusun yang dikembangkan potensi lokalnya secara terpadu. Baik sumber daya alam, pertanian, sosial budaya maupun lingkungan permukiman sebagai desa wisata.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun berharap, keberadaan Kawi Gesang mampu mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata, terutama wisata alam. Saat ini, katanya, wisatawan sedang menggemari wisata lingkungan atau kembali ke alam.



TERPOPULER

KRIMINALITAS SOLO
Sepasang Kekasih Babak Belur Dihajar Massa Gara-Gara Menjambret

LAGA LUK COBA
Borneo FC Jadi Lawan Pertama Persis Solo

Ojek Bule Viral Lagi, Kini Pakai Nama Tyler Wilson

Indonesia Raih 1 Gelar Juara dan 2 Runner Up di Thailand Masters 2018

Catatan Peristiwa Dunia Hari Ini, 15 Januari





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**



SERTIFIKAT

Nomor: B-317.1/UIN:02/L.3/PM.03.1/P4.32/10/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Ashfin Balady
Tempat, dan Tanggal Lahir : Madiun, 09 April 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12250020
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-90), di:

Lokasi : Bibis
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,50 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 12 Oktober 2016
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.8.49/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Ashfin Balady :
تاريخ الميلاد : ٩ أبريل ١٩٩٤

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٦ يونيو ٢٠١٧، وحصل على
درجة :

٤٧	فهم المسموع
٤٣	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٩	فهم المقروء
٣٩٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٦ يونيو ٢٠١٧

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.6.27/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Ashfin Balady**
Date of Birth : **April 09, 1994**
Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **May 24, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	41
Total Score	413

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 24, 2017

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Ashfin Balady
 NIM : 12250020
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	75	B
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	80	B
5.	Total Nilai	82.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pd. Kepala PTIPD



Blendra Hidayat, S.Kom
 19790506 200604 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : ASHFIN BALADY
NIM : 12250020
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD/PP.00.9/1829.a/2015

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

Ashfin Balady

12250020

LULUS dengan Nilai 77,5 (B)

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Dekan



Murjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 05 Oktober 2015
Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D
NIP. 19710919 199603 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : B-231a/Un.2/DD/PM.03.2/01/2017

Menyatakan bahwa :

(12250020) ASHFIN BALADY

telah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS)

mikro, mezzo dan makro (termasuk Kuliah Kerja Nyata) selama 900 jam (12 SKS)
dengan kompetensi *engagement*, *assesment*, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo,
intervensi makro dan evaluasi program.

Dekan



Dr. Nurjannah, M.Si

NIP. 196000310 198703 2 001

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.IP, MSW

NIP. 19721016 199903 2 008

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

	Nama Lengkap	Ashfin Balady
	Jenis Kelamin	Laki – Laki
	TT L	Madiun, 09 April 1994
	Agama	Islam
	Status	Belum Menikah
	Alamat	RT.14/RW.04,Ds.Darmorejo Kec.Mejayan, Madiun.
	No.Telp	08972772000
	E-mail	ashfinb@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

2001 – 2006	SD Negeri Darmorejo 02, Mejayan, Madiun
2007 – 2009	SMP Negeri 1 Mejayan, Madiun
2010 – 2012	SMA Negeri 1 Mejayan, Madiun
2012 – 2017	Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

HMI UIN Sunan Kalijaga
Sekolah Politik Kerakyatan Kibar Yogyakarta
Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Seluruh Indonesia, (Forkomkasi) Regional DIY